

SKRIPSI

**DAMPAK KREDIT USAHA RAKYAT PADA SEKTOR
USAHA MIKRO TERHADAP KEMISKINAN DI
KABUPATEN BIREUEN**



Disusun Oleh:

**AURA AL THARIQ
NIM. 190604059**

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2025 M/ 1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Aura al thariq
NIM : 19060404059
Program Studi : Ilmu Ekonomi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 9 Januari 2025

Yang Menyatakan,

[Signature]
Aura al Thariq

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ilmu Ekonomi
Dengan Judul

**DAMPAK KREDIT USAHA RAKYAT PADA SEKTOR USAHA MIKRO TERHADAP
KEMISKINAN DI KABUPATEN BIREUEN**

Disusun Oleh :

Aura Al Thariq
NIM. 190604059

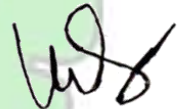
Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I



Dr. Khairul Amri, S.E., M.Si
NIDN : 0106077507

Pembimbing II



Uliya Azra, S.E., M.Si
NIP : 199410022022032001

Mengetahui Ketua
Program Studi Ilmu Ekonomi



Cut Dian Fitri, S.E., M.Si., Ak., CA NIP.
NIP : 1983070920140320002



**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Aura Al Thariq
NIM : 190604059
Fakultas/Program Studi : Ekonomi Dan Bisnis Islam / Ilmu Ekonomi
E-mail : auraalthariq111@gmail.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

**DAMPAK KREDIT USAHA RAKYAT PADA SEKTOR USAHA MIKRO TERHADAP
KEMISKINAN DI KABUPATEN BIREUEN**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di :
Pada tanggal : 10 Januari 2025

Mengetahui

Penulis

Aura Al Thariq
NIM : 190604059

Pembimbing I

Dr. Khairul Amri, S.E., M.Si
NIDN : 0106077507.

Pembimbing II

Uliya Azra, S.E., M.Si
NIP : 199410022022032001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”
(Asy-Syarh: 5)

“Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ucapan syukur Alhamdulillah, karya sederhana ini penulis

Persembahkan untuk:

Kedua Orang Tua Saya

Ibu “Aprillia Trisna Wardiyanti” dan ayah “Almunir”

Kakanda “Alvo Munawar”, Alvandro Akbar, dan Adinda “M Sheryl Aldran”

Yang selalu memberiku doa, semangat dan kasih sayang yang tak ternilai harganya,
Serta seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan motivasi, bimbingan dan selalu
mendoakan”



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Dampak Kredit Usaha Rakyat Pada Sektor Usaha Mikro Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Bireuen**”

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan strata satu (S1) pada Fakultas Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, pengarahan, dan dukungan dari berbagai pihak yang dengan ketulusan, kasih sayang, dan pengorbanannya memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
2. Cut Dian Fitri, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Prodi Ilmu Ekonomi
3. Rachmi Meutia, S.E., S.Pd.I., M.Sc., selaku Pembimbing Akademik
4. Hafiizh Maulana, S.P., S.H.I., M.E. selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
5. Dr. Khairul Amri, S.E., M.Si dan Uliya Azra, S.E., M.Si selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan dorongan dan arahan dari merencanakan hingga selesainya penelitian ini.
6. Dosen, staf pengantar dan karyawan di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
7. Ayahanda dan Ibunda serta semua keluarga yang telah memberikan doa, kasih sayang, perhatian dan pengorbanan

- moral dan material yang tidak terkira.
8. Terima kasih juga kepada Sahabat-sahabat saya Rafif, Fahmi, Anas, Farhan, Ravikar, Farid, Nanda, Rizki, Agus, Ananda, Khairul yang telah memberikan bantuan, semangat, dan motivasi kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini, dan terima kasih juga kepada kawan-kawan seperjuangan di prodi Ilmu Ekonomi angkatan 2019 yang telah memberikan semangat kepada penulis, serta kepada kawan-kawan lainnya yang selalu memberikan semangat dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

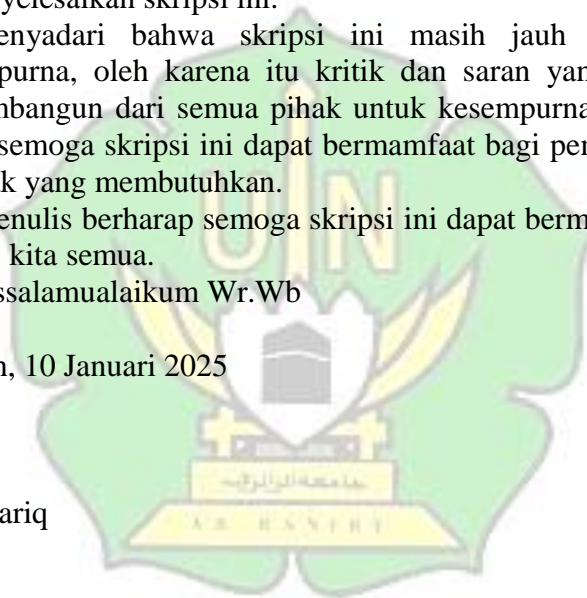
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermamfaat bagi pembaca dan pihak yang membutuhkan.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Amiin. Wassalamualaikum Wr.Wb

Banda Aceh, 10 Januari 2025

Aura Al Thariq



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun1987 –Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	”
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	”
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vocal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vocal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vocal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Contoh:

kaifa : كيف
hauḷa : هول

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

3. Maddah

Maddah atau panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
يَ/ا	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

qāla : قَالَ
ramā : رَمَى
qīla : قِيلَ

yaqūlu : يَقُولُ

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) (yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
al-Madīnah al-Munawwarah/ : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
Ṭalḥah : طَلْحَةُ

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf,

ABSTRAK

Nama : Aura Al Thariq
NIM : 190604059
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Illmu Ekonomi
Judul : Dampak
Kredit Usaha Rakyat Pada Sektor
Usaha Mikro Terhadap
Tanggal Sidang : 10 Januari 2025
Tebal Skripsi : 75
Pembimbing I : Dr. Khairul Amri, S.E.,
M.Si Pembimbing II : Uliya Azra, S.E., M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk Menilai dampak pemberian KUR terhadap usaha mikro dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Bireun, dengan mengidentifikasi perubahan sosial-ekonomi yang terjadi pada pemilik usaha mikro yang menerima KUR. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan 20 informan dari penerima KUR dan informan dari pihak pemberi KUR (Bank Aceh). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah memberikan dampak positif yang signifikan bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Bireun. KUR telah memudahkan akses permodalan bagi para pelaku UMKM sehingga mereka dapat mengembangkan usaha secara lebih optimal. Hal ini terlihat dari peningkatan produksi, penyerapan tenaga kerja, dan pendapatan masyarakat. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan dan hambatan yang perlu diatasi, seperti perlunya perbaikan pada sistem penyaluran, prosedur pengajuan, dan pengawasan pemanfaatan KUR, serta sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat. Penerapan rekomendasi yang diusulkan diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan optimal bagi UMKM di Kabupaten Bireun, sehingga dapat mendorong perkembangan UMKM dan pada akhirnya menurunkan tingkat kemiskinan di daerah tersebut

Kata Kunci : KUR, Kemiskinan, Sektor Usaha Mikro

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PENYATAAN KEASLIAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SIDANG.....	v
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	ix
ABSTRAK.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Manfaat Penelitian.....	13
BAB II LANDASAN TEORI.....	15
2.1. Kemiskinan.....	15
2.1.1 Pengertian Kemiskinan, Penyebab dan Dampak.....	15
2.1.2 Dampak Kemiskinan Terhadap Masyarakat dan Pembangunan Ekonomi	18
2.1.3 Indikator Kemiskinan	22
2.1.4 Ukuran Kemiskinan	27
2.1.5 Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan	28
2.2 Kredit Usaha Rakyat (KUR)	29
2.2.1 Pengertian KUR	29
2.2.2 Peran KUR dalam Pengentasan Kemiskinan	31
2.3 Sektor Usaha Mikro dan Perannya dalam Pembangunan Ekonomi.....	32
2.3.1 Peran Usaha Mikro dalam Pembangunan Ekonomi Lokal	32
2.3.2 Tantangan dan Peluang Usaha Mikro	33
2.4. Penelitian Terdahulu.....	35

BAB III METODE PENELITIAN	44
3.1 Metode dan Pendekatan Penelitian.....	44
3.2 Jenis Metode Penelitian.....	45
3.3 Lokasi Penelitian	46
3.4 Informan Penelitian	46
3.5 Teknik Pengumpulan Data	47
3.6 Teknik Analisis Data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	56
4.2 Hasil Penelitian	57
4.2.1 Dampak Pemberian KUR Terhadap Usaha Mikro Dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bireun pada Pengembangan Usaha	57
4.2.2 Implementasi Pemberian KUR Terhadap Usaha Mikro Dalam mengurangi Tingkat kemiskinan di Kabupaten Bireun.....	89
4.3 Pembahasan	113
BAB V PENUTUP	120
5.1 Kesimpulan.....	120
5.2 Saran.....	121
DAFTAR PUSTAKA	123

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin Kab Bireun.....	39
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	39
Tabel 3.1 Jenis Usaha Mikro Informan dan jumlah Pinjaman ..	26
Tabel 4.1 Data KUR Bank Aceh	42



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Persentase Penduduk Miskin Indonesia Tahun 2013-2023.....	2
Gambar 1.2 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bireun Tahun 2012-2022	8
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	43



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan

Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

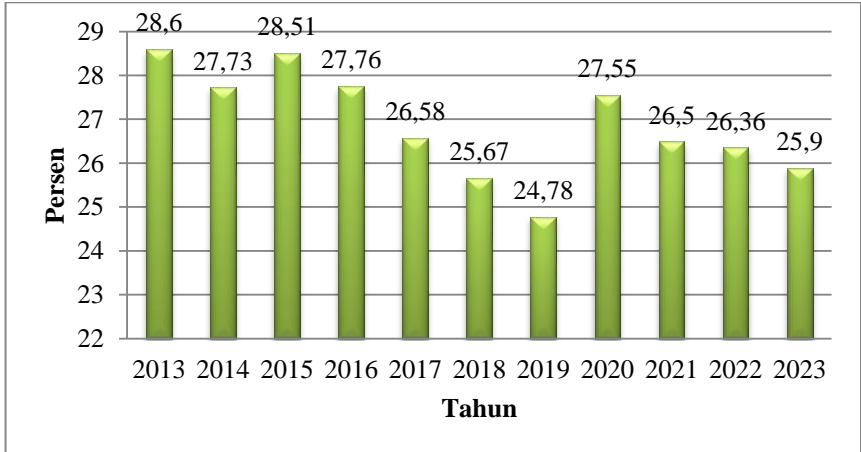
1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan kondisi di mana individu atau kelompok tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya ekonomi, sosial, dan kesehatan yang esensial untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Hal ini sering kali disebabkan oleh rendahnya pendapatan, kurangnya akses pendidikan yang berkualitas, ketidakstabilan ekonomi, dan berbagai faktor lainnya yang memperburuk kondisi hidup. Kemiskinan tidak hanya mencakup keterbatasan materi, tetapi juga berdampak pada kesehatan fisik dan mental, serta menghambat perkembangan potensi individu dan kemungkinan kesetaraan dalam masyarakat. Oleh karena itu, penanganan kemiskinan memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan melalui kebijakan publik yang mendukung pemberdayaan ekonomi, pendidikan yang inklusif, serta akses yang lebih luas terhadap layanan kesehatan dan sosial (Okuputra & Nasihk, 2022).

Berdasarkan BPS, (2023) Jumlah penduduk miskin pada Tahun 2023 sebesar 25,90 juta orang, menurun 0,46 juta orang dari Tahun 2022. Data persentase penduduk miskin penduduk Indonesia dari Tahun 2013-2023 adalah sebagai berikut :

Gambar 1. 1

Persentase Penduduk Miskin Indonesia Tahun 2013-2023



Sumber : BPS, 2023

Gambar 1.1 menunjukkan tren fluktuasi tingkat kemiskinan di Indonesia dari tahun 2013 hingga 2023. Pada tahun 2013, persentase penduduk miskin mencapai 28,6%, kemudian mengalami penurunan tipis pada tahun 2014 menjadi 27,73%. Namun, pada tahun 2015, angka kemiskinan kembali meningkat menjadi 28,51%, sebelum kembali mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 27,76%. Tren penurunan kemiskinan terus berlanjut hingga tahun 2019, di mana persentase penduduk miskin mencapai 24,78%. Namun, pada tahun 2020 terjadi lonjakan kembali menjadi 27,55%, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 dan 2022, namun masih berada pada kisaran 26%. Pada tahun 2023, tingkat kemiskinan mencapai 25,9%, menunjukkan adanya upaya penurunan namun masih perlu perhatian lebih lanjut

untuk menjaga stabilitasnya. Fluktuasi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, sosial, dan kebijakan yang dilakukan selama periode tersebut, serta kondisi eksternal yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Salah satu strategi yang efektif dalam menanggulangi kemiskinan adalah dengan meningkatkan pendapatan melalui usaha mikro masyarakat. Usaha mikro memberikan peluang bagi individu atau kelompok yang kurang mampu untuk memulai bisnis dengan modal yang relatif kecil (Gitiyarko, 2020). Dengan memperkuat sektor usaha mikro, pemerintah dapat memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan, akses modal, dan bimbingan teknis untuk membantu masyarakat mengembangkan usaha mereka. Selain itu, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan usaha mikro, seperti penyediaan infrastruktur dasar dan akses pasar yang lebih luas, juga merupakan langkah penting dalam meningkatkan pendapatan dan mengurangi tingkat kemiskinan di masyarakat. Dengan memperkuat sektor usaha mikro, masyarakat dapat lebih mandiri secara ekonomi dan memiliki kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri serta mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial (Rahmadani, 2022).

Menurut data yang disampaikan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkopukm),

jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 64,2 juta unit. Dalam struktur UMKM, usaha mikro yang memiliki kriteria omzet maksimal Rp2 miliar per tahunnya mendominasi. Pada tahun 2021, jumlah usaha mikro mencapai 63.955.369 unit atau menyumbang sebanyak 99,62% dari total unit usaha di Indonesia. Proporsi ini menunjukkan sedikit perubahan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Adapun untuk usaha kecil, yang memiliki kriteria omzet antara Rp2 hingga Rp15 miliar per tahun, hanya ada sebanyak 193.959 unit. Kontribusi dari jenis usaha ini terhadap jumlah total UMKM adalah sebesar 0,3% (KemenkopUKM, 2023).

Peran penting usaha mikro dalam pembangunan dan perlindungan ekonomi Indonesia telah terbukti sejak krisis ekonomi melanda negara ini mulai tahun 1998. Pada saat itu, usaha mikro menjadi penopang utama dalam pemulihan ekonomi nasional dengan memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja (Farisi et al., 2022). UMKM, yang sebagian besar berbasis pada sumber daya ekonomi lokal dan tidak bergantung pada impor, serta produknya memiliki nilai tambah yang unik, diyakini akan memperkuat fondasi ekonomi nasional (Vinatra, 2023).

Pada masa krisis ekonomi, usaha mikro terbukti mampu menyerap sekitar 99,45 persen dari total tenaga kerja yang ada, atau sekitar 73,24 juta tenaga kerja. Kontribusi yang

signifikan ini menjadikan usaha mikro sebagai pilar utama dalam proses pemulihan ekonomi nasional, baik dari segi pertumbuhan ekonomi maupun peningkatan kesempatan kerja. Fleksibilitas usaha mikro dalam menyesuaikan diri dengan perubahan pasar, seperti pergeseran selera konsumen dan tren, membuatnya mampu bertahan dalam kondisi krisis. Meskipun usaha mikro sering kali menghadapi kendala dalam pengembangan, terutama dalam hal strategi dan sumber daya manusia, upaya pengembangan UMKM terus dilakukan melalui serangkaian pembinaan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, perguruan tinggi, swasta, dan LSM (Pusporini, 2020).

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah strategis untuk mendukung pengembangan usaha mikro salah satunya melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program ini, yang didukung oleh Inpres dan regulasi keuangan terkait, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan serta modal manusia dan modal sosial kaum miskin melalui bantuan finansial dalam memulai atau mengembangkan usaha mikro. Diharapkan bahwa program ini akan menjadi salah satu pilar dalam modal usaha mikro, sehingga dapat terus memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Menurut data yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenkopUKM), penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)

pada usaha mikro di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, jumlah total penyaluran KUR mencapai angka yang signifikan, di mana sebagian besar diperuntukkan bagi usaha mikro. Peningkatan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung pengembangan usaha mikro sebagai salah satu strategi utama untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Dengan peningkatan penyaluran KUR pada usaha mikro, diharapkan dapat memberikan dampak yang positif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, terutama mereka yang berada di lapisan ekonomi bawah. Data lebih lanjut tentang penyaluran KUR pada usaha mikro dapat memberikan gambaran yang lebih rinci tentang kontribusi program tersebut dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa KUR tidak hanya menjadi instrumen finansial, tetapi juga merupakan salah satu kebijakan yang efektif dalam mendukung pembangunan ekonomi inklusif yang berkelanjutan.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak ditujukan untuk usaha menengah ke atas, melainkan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). KUR merupakan program pemerintah yang memberikan pembiayaan kepada UMKM.

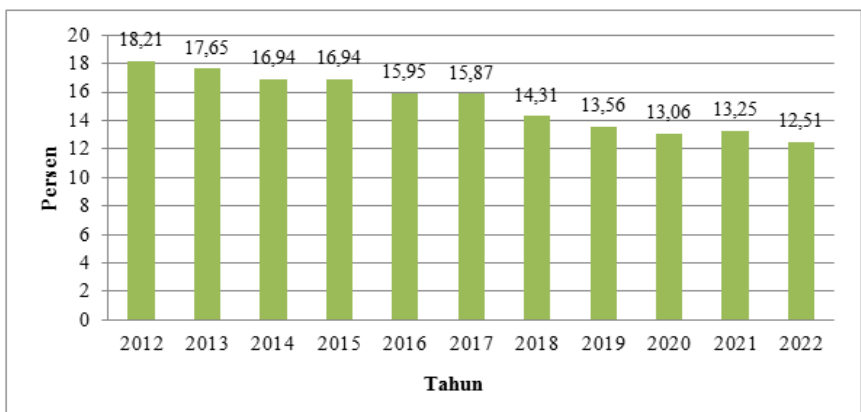
Syarat-syarat untuk mengajukan KUR, Memiliki usaha produktif dan layak, memiliki Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) atau surat ijin usaha lainnya, elah melakukan

usaha secara aktif minimal 1 Tahun, kUR dapat disalurkan kepada pelaku UMKM individu, badan usaha, dan/atau kelompok usaha, kUR dapat disalurkan kepada pelaku UMKM individu, badan usaha, dan/atau kelompok usaha.

Kabupaten Bireun merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Menurut BPS, (2023) persentase penduduk miskin di Kabupaten Bireun dari tahun 2012 hingga 2022 menggambarkan tren penurunan yang konsisten selama periode tersebut. Mulai dari 18,21% pada tahun 2012, terjadi penurunan yang stabil hingga mencapai 12,51% pada tahun 2022. Penurunan ini menunjukkan adanya keberhasilan dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Bireun. Faktor-faktor seperti pembangunan ekonomi lokal, peningkatan akses terhadap pendidikan dan pelatihan, serta program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat mungkin telah berperan dalam pencapaian ini. Selain itu, kemungkinan adanya implementasi kebijakan pemerintah yang mendukung, baik dalam hal pemberian bantuan langsung maupun pembangunan infrastruktur yang merata, juga dapat menjadi faktor penentu dalam penurunan tingkat kemiskinan tersebut. Meskipun demikian, perlu diperhatikan bahwa adanya fluktuasi tahunan menunjukkan bahwa tantangan dalam mengatasi kemiskinan tetap relevan, dan upaya-upaya yang berkelanjutan masih diperlukan untuk memastikan bahwa penurunan tersebut berkelanjutan dan berdampak nyata pada

kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, analisis data ini memberikan gambaran tentang perkembangan positif dalam mengurangi kemiskinan di Kabupaten Bireun, namun juga menyoroti perlunya terus menerus melakukan pemantauan dan upaya-upaya yang lebih luas dan berkelanjutan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah perkembangan persentase penduduk miskin di Kabupaten Bireun.

Gambar 1.2
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bireun Tahun 2012-2022



Sumber : BPS, 2023

Gambar 1.2 menunjukkan persentase penduduk miskin di Kabupaten Bireun dari tahun 2012 hingga 2022, yang menggambarkan tren penurunan yang konsisten selama periode tersebut. Dimulai dari 18,21% pada tahun 2012, terjadi penurunan bertahap hingga mencapai 12,51% pada tahun

2022. Penurunan ini mencerminkan upaya yang terus-menerus dalam mengatasi kemiskinan di wilayah tersebut. Pada tahun 2013, terjadi penurunan ke 17,65%, dan kemudian pada tahun 2014 tetap stabil pada 16,94% yang berlanjut hingga tahun 2015. Tren penurunan berlanjut di tahun-tahun berikutnya, di mana pada tahun 2016 turun menjadi 15,95%, dan pada tahun 2017 dan 2018 masing-masing menjadi 15,87% dan 14,31%. Penurunan yang signifikan terjadi pada tahun 2019, mencapai 13,56%, yang berlanjut hingga tahun 2020 dan 2021 dengan angka masing-masing 13,06% dan 13,25%. Pada tahun 2022, persentase penduduk miskin mencapai 12,51%, menunjukkan penurunan yang berkelanjutan dan berhasil dalam upaya mengurangi kemiskinan di Kabupaten Bireun.

Terkait dengan KUR pada tahun 2022, Bank Aceh telah berhasil menyalurkan seluruh kuota pembiayaan KUR Syariah yang diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koperasi. Kemudian, pada tahun 2023, Bank Aceh kembali dipercayai untuk mengelola kuota pembiayaan KUR tahap pertama sebesar Rp510,6 miliar di Kabupaten Bireun (Suryani, 2023).

Table 1.1
Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Bireun
di Provinsi Aceh Tahun 2005-2012

2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
106,3	102,9	93,0	79,9	72,94	76,10	76,3	74,8
%	%	%	%	%	%	%	%

Sumber : Bps kab bireun

Tabel diatas menunjukkan Angka kemiskinan Kabupaten Bireun pada tahun 2005 mencapai angka 106,3% masih terbilang cukup tinggi, pada tahun 2006 angka kemiskinan ada penurunan dari tahun sebelumnya mencapai 102,9% dari tahun sebelumnya, tahun 2007 angka kemiskinan kembali turun ke angka 93,0% , pada tahun 2008 angka kemiskinan turun menjadi 79,9%, pada tahun 2009 angka kemiskinan semakin menurun dari tahun sebelumnya mencapai 72,94%, angka kemiskinan kembali naik pada tahun 2010 mencapai 76,10% dan berhasil turun pada tahun 2011 mencapai 76 ,3%, dan kembali membaik dan menurun pada tahun 2012 angka kemiskinan mencapai 74,8%.

Salah satu faktor yang membuat kemiskinan di Kabupaten Bireun menurun karena adanya program KUR yang telah ajarkan pemerintah kepada masyarakat dan adanya bantuan dari lembaga-lembaga keuangan baik dari Pemerintahan maupun Swasta. Adapun program KUR yang di berikan

Pemerintah Kabupaten Bireun sangat berperan penting untuk menurunkan angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Bireun yang dulunya sangat tinggi.

Penelitian yang dilakukan oleh Iztiyar & Ashar, (2018) menyebutkan bahwa dalam upaya pembangunan ekonomi rakyat, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dijadikan sarana kebijakan pembangunan nasional. Keberadaan UMKM di Indonesia mempunyai peran penting dalam menyediakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan dan meningkatkan perekonomian nasional. Akan tetapi, salah satu masalah yang menghambat perkembangan UMKM adalah kekurangan akses permodalan. Pemerintah menciptakan beberapa program untuk mengentaskan kemiskinan, salah satunya program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Tujuan utama setiap kebijakan pemerintah diarahkan untuk menghilangkan masalah-masalah pokok yang masih fundamental yakni: masalah kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan dan masalah ekonomi lainnya. Berdasarkan hasil penelitian, penyaluran dana KUR memberikan pengaruh positif signifikan terhadap pengembangan usaha kecil dilihat dari bertambahnya jumlah UMKM, tenaga kerja UMKM dan nilai output UMKM serta meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Akan tetapi, memberikan pengaruh signifikan pada kemiskinan.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) memiliki dampak yang signifikan terhadap sektor usaha mikro dalam mengurangi tingkat kemiskinan, pemberian akses terhadap pembiayaan yang terjangkau dan mudah diakses, pelaku usaha mikro dapat meningkatkan kapasitas produksi dan ekspansi bisnis mereka. Hal ini memungkinkan para pemberi kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja lokal, serta meningkatkan daya beli masyarakat di sekitarnya. Dengan demikian, KUR tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga memberikan dorongan bagi pertumbuhan ekonomi inklusif yang dapat mengurangi tingkat kemiskinan dengan memberdayakan sektor usaha mikro.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti ingin mengkaji lebih jauh tentang **“Dampak Kredit Usaha Rakyat Pada Sektor Usaha Mikro Terhadap Kemiskinan Kabupaten Bireun”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka diketahui bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah program pemerintah dalam memperdayakan UMKM dan mengentaskan kemiskinan yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi. Jika dilihat dari penyalurannya, KUR

memiliki kelemahan yang mana program ini dianggap masih belum tepat sasaran maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut, yaitu:

1. Apa dampak pemberian KUR terhadap usaha mikro dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Bireun?
2. Bagaimana implementasi pemberian KUR terhadap usaha mikro dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Bireun?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk Menilai dampak pemberian KUR terhadap usaha mikro dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Bireun, dengan mengidentifikasi perubahan sosial-ekonomi yang terjadi pada pemilik usaha mikro yang menerima KUR.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis

1. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah:
 - a. Memberikan wawasan yang lebih dalam kepada pemerintah, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan terkait tentang efektivitas program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam mengurangi kemiskinan di Kabupaten Bireun. Informasi ini dapat digunakan untuk

mengevaluasi dan meningkatkan implementasi program KUR di masa mendatang.

- b. Memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pelaku usaha mikro di Kabupaten Bireun tentang manfaat dan peluang yang ditawarkan oleh program KUR, serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam memanfaatkannya.
2. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah:
- a. Menyumbangkan pemahaman yang lebih mendalam dalam literatur tentang peran program KUR dalam mengurangi kemiskinan, khususnya dalam konteks sektor usaha mikro di daerah pedesaan seperti Kabupaten Bireun.
 - b. Memperkaya teori dan pemikiran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program pengentasan kemiskinan melalui bantuan finansial kepada usaha mikro. Hal ini dapat memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Kemiskinan

2.1.1 Pengertian Kemiskinan, Penyebab dan Dampak

Kemiskinan merupakan fenomena kompleks yang melibatkan keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi, sosial, dan kesehatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar individu atau kelompok. Secara umum, kemiskinan tidak hanya mencakup aspek material seperti rendahnya pendapatan, tetapi juga mencakup aspek non-material seperti keterbatasan akses pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Dalam konteks global, Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi di mana individu hidup dengan kurang dari \$1,90 per hari (Hilmi et al., 2022).

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan utama di negara-negara berkembang seperti Indonesia, yang memiliki potensi menghambat kemajuan dalam pembangunan ekonomi. Pembangunan merupakan suatu proses transformasi menuju kondisi yang lebih baik secara berkelanjutan, dengan tujuan utama untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang adil, kompetitif, maju, dan sejahtera dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Pantjar Simatupang dan Saktyanu K, pembangunan haruslah dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan, disesuaikan dengan

prioritas dan kebutuhan unik masing-masing wilayah, sejalan dengan arah dan target pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui rencana pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Dengan demikian, salah satu indikator kunci keberhasilan pembangunan nasional adalah kemampuan untuk menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan (Hasballah, 2021).

Ada berbagai faktor yang menyebabkan kemiskinan. Salah satunya adalah rendahnya tingkat pendapatan, yang dapat disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan, kurangnya akses terhadap lapangan kerja yang layak, serta struktur ekonomi yang tidak merata. Selain itu, faktor-faktor seperti konflik bersenjata, bencana alam, dan ketidakstabilan politik juga dapat menjadi penyebab kemiskinan dengan menghambat pertumbuhan ekonomi dan merusak infrastruktur. Dampak kemiskinan dapat dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan. Secara ekonomi, kemiskinan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dengan mengurangi daya beli masyarakat dan membatasi investasi dalam pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Secara sosial, kemiskinan dapat menyebabkan ketimpangan sosial dan ketegangan di masyarakat, serta berkontribusi pada peningkatan tingkat kriminalitas dan konflik sosial. Secara kesehatan, kemiskinan dapat meningkatkan risiko terhadap penyakit dan kematian dini

karena akses terbatas terhadap layanan kesehatan dan nutrisi yang memadai. Dengan demikian, kemiskinan bukan hanya merupakan masalah ekonomi semata, tetapi juga merupakan masalah multidimensional yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Silalahi & Ginting, 2020).

Untuk mengatasi kemiskinan, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, organisasi non-pemerintah (LSM), dan masyarakat sipil. Langkah-langkah yang dapat diambil termasuk program pengentasan kemiskinan yang berorientasi pada pengembangan ekonomi lokal, investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan, pemberdayaan masyarakat, serta perlindungan sosial yang melindungi kelompok rentan dari dampak buruk kemiskinan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Putra et al., 2021).

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mendefinisikan kemiskinan sebagai keadaan di mana individu atau kelompok tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas hidup yang layak. Hak-hak dasar ini mencakup berbagai hal, seperti pemenuhan kebutuhan pangan, akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, kesempatan kerja, perumahan yang layak, akses

terhadap air bersih, perlindungan, serta keterlibatan dalam kehidupan sosial dan politik (Bappenas, 2022).

2.1.2 Dampak Kemiskinan Terhadap Masyarakat dan Pembangunan Ekonomi

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang kompleks dengan dampak yang meresahkan terhadap masyarakat dan pembangunan ekonomi. Dalam konteks ini, dampak kemiskinan tidak hanya terbatas pada individu atau keluarga yang terkena dampak, tetapi juga mempengaruhi seluruh masyarakat dan proses pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Salah satu dampak yang paling nyata dari kemiskinan adalah pada kesejahteraan masyarakat. Individu atau keluarga yang hidup dalam kemiskinan seringkali mengalami keterbatasan akses terhadap pangan yang cukup, perumahan layak, pendidikan yang berkualitas, dan layanan kesehatan yang memadai. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan risiko penyakit, kelaparan, dan kekurangan gizi, terutama pada anak-anak dan lansia. Dampak ini tidak hanya mempengaruhi kesejahteraan fisik, tetapi juga kesejahteraan psikologis, dengan meningkatnya tingkat stres, kecemasan, dan depresi di antara individu yang hidup dalam kemiskinan (Maulana et al., 2022).

Selain itu, kemiskinan juga memiliki dampak yang signifikan pada pembangunan ekonomi. Individu atau keluarga yang hidup dalam kemiskinan cenderung memiliki

akses terbatas terhadap sumber daya dan peluang ekonomi. Mereka mungkin tidak memiliki akses terhadap modal yang diperlukan untuk memulai atau mengembangkan usaha, pelatihan keterampilan yang diperlukan untuk pekerjaan yang layak, atau akses terhadap pasar kerja yang stabil. Akibatnya, kemiskinan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dengan mengurangi konsumsi, investasi, dan produktivitas tenaga kerja. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya lingkaran kemiskinan yang sulit diputuskan, di mana kemiskinan menjadi faktor penghambat bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Selain dampak langsung pada individu dan pembangunan ekonomi, kemiskinan juga memiliki dampak yang lebih luas pada stabilitas sosial dan politik suatu negara. Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang disebabkan oleh kemiskinan dapat menyebabkan ketegangan sosial, konflik, dan ketidakstabilan politik. Individu atau kelompok yang merasa tertinggal secara ekonomi cenderung lebih rentan terhadap radikalisme, ekstremisme, dan kekerasan sebagai cara untuk mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap kondisi sosial dan ekonomi yang tidak adil. Dampak ini dapat mengganggu proses pembangunan ekonomi dan sosial, serta menghambat upaya untuk mencapai perdamaian dan kestabilan dalam masyarakat (Silalahi & Ginting, 2020).

Untuk mengatasi dampak kemiskinan terhadap masyarakat dan pembangunan ekonomi, diperlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, LSM, dan masyarakat sipil. Langkah-langkah yang dapat diambil termasuk program pengentasan kemiskinan yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi lokal, investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan, serta pemberian perlindungan sosial yang melindungi kelompok rentan dari dampak buruk kemiskinan. Selain itu, penting untuk mempromosikan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap peluang ekonomi dan sosial. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat mengurangi dampak kemiskinan terhadap masyarakat dan mempercepat pembangunan ekonomi yang berkelanjutan bagi semua (Ummah et al., 2023).

Dampak kemiskinan tidak hanya terbatas pada individu atau keluarga yang terkena dampak langsung, tetapi juga meluas ke seluruh masyarakat dan pembangunan ekonomi suatu negara. Kemiskinan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam esai ini, akan dibahas dampak kemiskinan terhadap masyarakat dan pembangunan ekonomi.

Salah satu dampak utama dari kemiskinan adalah meningkatnya ketimpangan sosial. Ketidaksetaraan dalam distribusi pendapatan dan akses terhadap sumber daya menciptakan kesenjangan antara kelompok-kelompok ekonomi. Masyarakat yang miskin cenderung memiliki akses yang terbatas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, perumahan layak, dan pekerjaan yang layak, sehingga meningkatkan kesenjangan sosial dan memperkuat siklus kemiskinan (Azzahra et al., 2022).

Kemiskinan juga berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat. Individu yang hidup dalam kondisi kemiskinan seringkali mengalami gizi buruk, penyakit menular, dan kondisi kesehatan yang buruk akibat akses terbatas terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh individu yang miskin, tetapi juga oleh masyarakat luas karena meningkatnya risiko penyebaran penyakit dan beban kesehatan yang meningkat bagi sistem kesehatan. Selain itu, kemiskinan juga dapat menghambat pembangunan ekonomi suatu negara. Masyarakat yang hidup dalam kemiskinan cenderung memiliki kontribusi ekonomi yang rendah karena keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pelatihan, serta kesempatan kerja yang terbatas. Hal ini mengakibatkan rendahnya produktivitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi yang lambat. Selain itu, kemiskinan juga dapat menghambat investasi dalam infrastruktur dan

pengembangan sumber daya manusia, yang merupakan kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Azzahra et al., 2022)

2.1.3 Indikator Kemiskinan

Indikator kemiskinan yang disusun oleh Bappenas memiliki makna yang bervariasi, mencakup berbagai aspek kehidupan yang penting. Antara lain adalah (Bappenas, 2022):

- (1) Keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan pangan dan mutunya;

Indikator pertama kemiskinan adalah "keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan pangan dan mutunya." Hal ini mengacu pada kondisi di mana individu atau kelompok masyarakat tidak memiliki akses yang memadai atau tidak mampu membeli makanan yang cukup secara kuantitas dan kualitas yang memenuhi kebutuhan gizi mereka. Kondisi ini bisa terjadi karena berbagai faktor, termasuk rendahnya pendapatan, harga pangan yang tinggi, atau ketidaktersediaan pangan yang memadai di wilayah tersebut. Keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan pangan dan mutunya bisa memiliki dampak serius pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Kurangnya asupan gizi yang memadai dapat menyebabkan stunting pada anak-anak, rendahnya daya tahan tubuh, serta masalah kesehatan

lainnya seperti kekurangan zat besi, vitamin, dan mineral. Selain itu, keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan pangan juga dapat memengaruhi produktivitas dan kualitas hidup secara keseluruhan.

Untuk mengatasi indikator ini, diperlukan upaya yang terkoordinasi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta. Langkah-langkah tersebut dapat mencakup program bantuan pangan, program pengentasan kemiskinan, peningkatan akses terhadap sumber daya pertanian, promosi pertanian berkelanjutan, dan peningkatan kesadaran akan pentingnya pola makan yang sehat dan gizi yang seimbang. Upaya ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mencapai akses yang lebih baik terhadap pangan yang berkualitas dan memadai, sehingga meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi tingkat kemiskinan

- (2) Keterbatasan akses dan kualitas layanan kesehatan. Kemiskinan sering kali menyebabkan akses yang terbatas terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Masyarakat miskin mungkin tidak mampu membayar biaya perawatan kesehatan yang mahal, dan sering kali harus mengandalkan fasilitas kesehatan yang kurang memadai.

- (3) Keterbatasan akses dan kualitas layanan pendidikan. Anak-anak dari keluarga miskin sering kali menghadapi kesulitan dalam mengakses pendidikan yang berkualitas. Biaya pendidikan yang tinggi, kurangnya sarana dan prasarana pendidikan, serta kurangnya dukungan dari orang tua dapat menjadi hambatan bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
- (4) Keterbatasan kesempatan kerja yang disebabkan oleh jumlah tanggungan keluarga yang besar. Keluarga yang memiliki jumlah tanggungan yang besar cenderung mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hal ini dapat mengakibatkan kemiskinan yang bersifat kronis dan sulit untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.
- (5) Lemahnya perlindungan terhadap aset usaha dan disparitas upah. Usaha mikro dan kecil yang dimiliki oleh masyarakat miskin sering kali tidak mendapatkan perlindungan yang memadai dari regulasi dan lembaga keuangan. Selain itu, disparitas upah antara pekerja miskin dan pekerja yang lebih mapan juga dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi yang lebih besar.
- (6) Keterbatasan akses terhadap layanan perumahan dan sanitasi: Masyarakat miskin sering kali tinggal di lingkungan yang tidak layak dan tidak sehat, dengan

akses terbatas terhadap air bersih, sanitasi yang memadai, dan perumahan yang layak.

- (7) Keterbatasan akses terhadap air bersih. Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang penting untuk kesehatan dan kebersihan, namun banyak masyarakat miskin yang tidak memiliki akses yang memadai terhadap air bersih.
- (8) Ketidakpastian dalam kepemilikan dan penguasaan tanah. Masyarakat miskin sering kali menghadapi masalah dalam hal kepemilikan dan penguasaan tanah, yang dapat menghambat akses mereka terhadap sumber daya alam dan kegiatan ekonomi lainnya.
- (9) Memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta keterbatasan akses masyarakat terhadap sumber daya alam. Kemiskinan juga dapat menyebabkan eksploitasi yang berlebihan terhadap lingkungan hidup dan sumber daya alam, yang pada gilirannya dapat memperburuk kondisi lingkungan hidup.
- (10) Lemahnya rasa aman. Kemiskinan sering kali terkait dengan tingkat kejahatan dan ketidakamanan yang lebih tinggi, karena masyarakat miskin rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan.
- (11) Kurangnya partisipasi. Kemiskinan dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek

kehidupan, termasuk partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan lokal.

- (12) Beban kependudukan yang besar karena jumlah tanggungan keluarga yang besar. Keluarga miskin sering kali memiliki jumlah tanggungan yang besar, yang dapat menyebabkan beban ekonomi yang berat dan membatasi kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan.
- (13) Tata kelola pemerintahan yang kurang baik. Kurangnya tata kelola pemerintahan yang baik dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya, meningkatkan risiko korupsi, dan menghambat efektivitas program-program penanggulangan kemiskinan.

Indikator kemiskinan yang sering digunakan di Indonesia adalah garis kemiskinan atau poverty line. Badan Pusat Statistik (BPS) menetapkan batas garis kemiskinan di Indonesia berdasarkan jumlah uang yang diperlukan untuk membeli kebutuhan makanan dan non-makanan minimum setiap bulannya. Berikut adalah indikator yang digunakan oleh BPS (BPS, 2022):

- a. Kategori "Tidak miskin" berlaku untuk individu yang memiliki pengeluaran per bulan per orang lebih dari Rp 350.610,-.

- b. Kategori "Hampir tidak miskin" berlaku untuk individu yang memiliki pengeluaran per bulan per kepala antara Rp 280.488,- hingga Rp 350.610,-, atau sekitar antara Rp 9.350,- hingga Rp 11.687,- per orang perhari.
- c. Kategori "Hampir miskin" berlaku untuk individu yang memiliki pengeluaran per bulan per kepala antara Rp 233.740,- hingga Rp 280.488,-, atau sekitar antara Rp 7.780,- hingga Rp 9.350,- per orang per hari.
- d. Kategori "Miskin" berlaku untuk individu yang memiliki pengeluaran per bulan per kepala kurang dari Rp 233.740,-, atau sekitar kurang dari Rp 7.780,- per orang per hari.
- e. Kategori "Sangat miskin" atau "kronis" tidak memiliki kriteria pengeluaran per orang per hari yang pasti. Jumlahnya tidak dapat ditentukan dengan pasti.

2.1.4 Ukuran Kemiskinan

Garis kemiskinan merupakan sebuah standar yang menetapkan jumlah pengeluaran yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan, atau sebagai patokan untuk menentukan apakah seseorang dianggap miskin berdasarkan tingkat konsumsinya. Setiap negara memiliki garis kemiskinan yang berbeda-beda karena adanya perbedaan dalam lokasi dan standar kebutuhan hidup. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Garis Kemiskinan

Makanan (GKM) ditetapkan berdasarkan nilai pengeluaran minimum yang setara dengan asupan kalori 2.100 kalori per kapita per hari, berdasarkan pada Widyakarya Pangan dan Gizi tahun 1978. Paket komoditas makanan dasar yang diwakili oleh 52 jenis komoditas, seperti padi, umbi-umbian, ikan, daging, telur, sayuran, buah-buahan, minyak, dan lemak, merupakan komoditas yang paling banyak dikonsumsi oleh orang miskin, mencakup sekitar 70 persen dari total pengeluaran mereka (Kasriyati, 2018).

Di sisi lain, World Bank menetapkan standar kemiskinan berdasarkan pendapatan per kapita, yaitu individu yang pendapatannya kurang dari sepertiga dari rata-rata pendapatan per kapita nasional. Menurut World Bank, ukuran kemiskinan adalah kurang dari USD \$2 per orang per hari. Kategori kemiskinan menurut BPS melibatkan beberapa aspek, termasuk luas lantai bangunan tempat tinggal per orang, jenis material bangunan, ketersediaan fasilitas sanitasi, sumber penerangan, sumber air minum, bahan bakar untuk memasak, frekuensi konsumsi daging atau susu, kemampuan untuk membeli pakaian baru, akses terhadap perawatan kesehatan, sumber pendapatan, tingkat pendidikan, serta kepemilikan aset atau tabungan (World Bank, 2019).

2.1.5 Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan

Menurut Kuncoro, ada tiga faktor utama yang menjadi penyebab kemiskinan jika dilihat dari perspektif ekonomi.

Pertama, kemiskinan muncul karena ketidakadilan dalam kepemilikan sumber daya yang menghasilkan distribusi pendapatan yang tidak merata. Orang-orang miskin cenderung memiliki sumber daya yang terbatas dan berkualitas rendah, sedangkan orang-orang kaya memiliki akses lebih banyak ke sumber daya yang berkualitas tinggi. Kedua, kemiskinan disebabkan oleh perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Tingkat pendidikan yang rendah atau nasib yang kurang beruntung menyebabkan produktivitas kerja yang rendah, yang kemudian berdampak pada pendapatan yang rendah pula. Akhirnya, ketiga, kemiskinan disebabkan oleh perbedaan akses terhadap modal. Ketiga faktor ini mengarah pada apa yang dikenal sebagai teori lingkaran setan kemiskinan. Ketertinggalan ekonomi, kurangnya akses pasar yang sempurna, dan kekurangan modal menghasilkan produktivitas yang rendah. Rendahnya produktivitas menyebabkan pendapatan yang rendah, yang pada gilirannya menyebabkan tabungan dan investasi yang rendah. Ini akan terus memperdalam kemiskinan dan mengikat individu atau komunitas dalam lingkaran setan kemiskinan yang sulit untuk terlepas darinya (Bappenas, 2018)

2.2 Kredit Usaha Rakyat (KUR)

2.2.1 Pengertian KUR

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu inisiatif pemerintah untuk mendorong perbankan dalam

menyalurkan kredit modal kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), dan Koperasi. KUR bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan sektor riil ekonomi dengan tujuan utama untuk mengatasi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja baru. Secara lebih rinci, program KUR bertujuan untuk meningkatkan akses keuangan bagi UMKM dan Koperasi, serta sebagai upaya konkrit dalam menangani masalah kemiskinan dengan memperluas peluang kerja (Mongkito et al., 2021).

KUR terdiri dari Kredit Modal Kerja (KMK) dan/atau Kredit Investasi (KI) dengan plafon hingga Rp500 juta yang diberikan kepada UMKM dan Koperasi yang berpotensi namun belum memenuhi kriteria bankable. Menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), KUR termasuk dalam Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil, yang bertujuan untuk meningkatkan akses keuangan bagi UMKM. Secara umum, KUR adalah bagian dari strategi pemerintah untuk mendukung UMKM yang layak mendapatkan bantuan keuangan dari lembaga keuangan, dengan tujuan akhir meningkatkan perekonomian, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan lapangan kerja baru (Arsane & Darmawan, 2021)

2.2.2 Peran KUR dalam Pengentasan Kemiskinan

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Dengan memberikan akses lebih mudah kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), dan Koperasi untuk mendapatkan modal usaha, KUR mampu membantu masyarakat yang berada dalam garis kemiskinan untuk meraih kesejahteraan ekonomi. Melalui KUR, pelaku usaha mikro yang sebelumnya sulit mendapatkan akses keuangan dari lembaga keuangan formal, kini dapat memperoleh modal dengan syarat yang lebih mudah, seperti plafon kredit yang relatif rendah dan persyaratan yang lebih fleksibel. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengembangkan usaha mereka, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan peluang kerja baru, yang pada akhirnya berkontribusi secara signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan di masyarakat (Ratnasari, 2022).

Selain itu, KUR juga berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia dengan membuka akses keuangan bagi lapisan masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal. Dengan memberikan kesempatan kepada UMKM dan Koperasi untuk mendapatkan pendanaan, KUR memberikan dorongan bagi pertumbuhan sektor riil ekonomi, yang merupakan sektor yang secara langsung terlibat dalam menciptakan lapangan kerja dan

menghasilkan pendapatan bagi masyarakat. Selain itu, melalui KUR, pemerintah juga mendorong pengembangan UMKM yang memiliki potensi untuk berkembang menjadi pelaku ekonomi yang lebih mandiri dan berdaya saing, sehingga tidak hanya mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial, tetapi juga meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, peran KUR dalam pengentasan kemiskinan tidak hanya terbatas pada pemberian modal usaha, tetapi juga mencakup aspek-aspek yang lebih luas dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Adha, 2023b).

2.3 Sektor Usaha Mikro dan Peranannya dalam Pembangunan Ekonomi

2.3.1 Peran Usaha Mikro dalam Pembangunan Ekonomi Lokal

Usaha mikro memainkan peran yang krusial dalam pembangunan ekonomi lokal di banyak negara, termasuk Indonesia. Dalam konteks lokal, usaha mikro seringkali menjadi tulang punggung ekonomi di berbagai daerah, karena mereka berperan dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan menggerakkan aktivitas ekonomi di tingkat komunitas. Usaha mikro umumnya lebih terhubung dengan kebutuhan lokal dan pasar domestik, yang memungkinkan mereka untuk memanfaatkan potensi ekonomi lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Keberadaan usaha mikro juga mendukung inklusi

ekonomi di tingkat lokal dengan memberikan peluang kepada warga lokal untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi. Dengan modal yang relatif kecil, usaha mikro seringkali dapat diakses oleh masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal. Hal ini mendorong partisipasi ekonomi dari beragam lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berasal dari kelompok ekonomi lemah, dan menciptakan kesempatan untuk peningkatan pendapatan dan perbaikan kondisi sosial ekonomi di tingkat lokal (Pasaribu et al., 2020).

Selain itu, usaha mikro juga berperan dalam memperkuat identitas budaya dan ekonomi lokal. Banyak usaha mikro menghasilkan produk dan jasa yang mencerminkan kekayaan budaya dan kearifan lokal suatu daerah. Dengan mempromosikan dan mendukung produk-produk lokal, usaha mikro membantu menjaga keberlanjutan warisan budaya dan ekonomi setempat. Dengan demikian, peran usaha mikro tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi semata, tetapi juga berdampak pada pengembangan sosial, budaya, dan ekonomi komunitas lokal secara keseluruhan (Kusumaningrum & Yuhan, 2019).

2.3.2 Tantangan dan Peluang Usaha Mikro

Usaha mikro, meskipun memiliki potensi besar dalam menggerakkan ekonomi lokal dan memberikan kontribusi pada kesejahteraan masyarakat, juga dihadapkan pada berbagai tantangan yang perlu dihadapi. Salah satu tantangan utama

yang dihadapi oleh usaha mikro adalah keterbatasan modal dan akses keuangan. Banyak pelaku usaha mikro menghadapi kesulitan dalam mendapatkan modal untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka, terutama karena lembaga keuangan formal cenderung enggan memberikan pinjaman kepada sektor ini yang dianggap memiliki risiko tinggi. Selain itu, infrastruktur yang kurang memadai dan birokrasi yang kompleks juga menjadi hambatan bagi pertumbuhan usaha mikro. Infrastruktur yang tidak memadai, seperti akses transportasi dan listrik yang terbatas, dapat menghambat operasional dan distribusi produk, sementara birokrasi yang rumit dapat memperlambat proses perizinan dan mengakses layanan publik yang diperlukan untuk menjalankan usaha (Rahmatullah, 2020).

Namun, di tengah tantangan yang ada, usaha mikro juga menawarkan peluang besar dalam pembangunan ekonomi lokal. Dengan teknologi digital yang semakin berkembang, usaha mikro dapat memanfaatkan platform digital untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan efisiensi operasional mereka. Selain itu, meningkatnya kesadaran akan keberlanjutan dan kearifan lokal membuka peluang bagi usaha mikro untuk menghasilkan produk dan layanan yang berkelanjutan secara lingkungan dan sosial, sehingga dapat menarik minat konsumen yang semakin peduli terhadap dampak ekologis dan sosial dari produk yang mereka beli.

Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan kontribusinya dalam pembangunan ekonomi lokal, diperlukan dukungan dan kebijakan yang mendukung dari pemerintah serta upaya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Langkah-langkah seperti penyediaan akses keuangan yang lebih mudah, penyediaan infrastruktur dasar yang memadai, dan penyederhanaan regulasi bisnis dapat membantu mengatasi tantangan yang dihadapi oleh usaha mikro, sementara pelatihan dan pendampingan bisnis dapat membantu memanfaatkan peluang yang ada untuk pertumbuhan dan keberlanjutan usaha mikro (Hatuti, 2021).

2.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang mungkin memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Penelitian terdahulu juga menjadi salah satu bahan pertimbangan sehingga dapat memberi referensi dalam menulis ataupun mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Berikut adalah penelitian yang menjadi acuan dan referensi peneliti dalam melakukan penelitian:

1. Ulfa & Mulyadi, (2020). Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Meneliti konsekuensi dari penerapan KUR dalam sektor usaha mikro; dan (2) Mengidentifikasi implikasi dari perkembangan usaha mikro terhadap upaya penanggulangan kemiskinan. Metode yang

digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam dampak-dampak yang muncul dari implementasi KUR dan perkembangan usaha mikro terhadap penanggulangan kemiskinan. Pengambilan sampel dilakukan melalui metode purposive sampling, di mana informan dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang objek penelitian. Informan terdiri dari pejabat di Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, pelaku usaha, serta tokoh masyarakat yang terlibat secara langsung dalam konteks penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan KUR memberikan dampak positif dalam pengembangan usaha mikro di Kota Makassar, sementara perkembangan usaha mikro juga memberikan dampak positif dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

2. Iztiyar & Ashar, (2018). Dalam rangka memperkuat ekonomi rakyat, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi fokus utama kebijakan pembangunan nasional. Peran yang dimainkan oleh UMKM di Indonesia sangatlah penting, baik dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi tingkat

kemiskinan, menyeimbangkan distribusi pendapatan, maupun meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Namun, salah satu kendala utama yang dihadapi oleh UMKM adalah kekurangan akses terhadap modal. Dalam upaya mengatasi masalah ini, pemerintah telah meluncurkan berbagai program, termasuk program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Setiap kebijakan pemerintah memiliki tujuan utama untuk mengatasi masalah-masalah fundamental seperti kemiskinan, ketidaksetaraan dalam distribusi pendapatan, dan persoalan ekonomi lainnya. Berdasarkan temuan penelitian, penyaluran dana KUR telah menunjukkan dampak positif yang signifikan terhadap perkembangan UMKM, yang tercermin dari peningkatan jumlah UMKM, tenaga kerja yang terserap, dan nilai produksi UMKM, serta pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Namun demikian, dampak positif ini tidak diikuti dengan penurunan signifikan dalam tingkat kemiskinan.

3. Maesya, (2015) dengan judul Implementasi Kebijakan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Bank BRI di Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak. Hasil ini didukung

dengan menunjukkan hubungan antara variabel terhadap kepuasan pelaku UMKM memiliki hubungan yang erat Hasil pengujian selanjutnya menunjukkan 5 variabel kualitas jasa yang terdiri dari bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan dan empati yang masing- masing menunjukkan pengaruh signifikan dan positif terhadap kepuasan masyarakat yang melakukan kredit pembiayaan perbankan di Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak hanya pada variabel daya tanggap dan empati.

4. Nuraffiati, (2023) dengan judul Analisis Produk KUR dan kualitas Pelayanan Dalam Meningkatkan Minat Menjadi Nasabah dengan hasil penelitian Kepuasan dan kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap loyalitas nasabah. Kepuasan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap loyalitas nasabah. Kepercayaan nasabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas nasabah.
5. Budiarto, (2020) dengan judul Efektivitas Implementasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Kantor Cabang Pembantu Makassar Tamalanrea" dengan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variable tangibles, reliability, responsiveness, dan assurance

secara simultan berpengaruh positif dan signifikan. Berdasarkan hasil analisis regresi secara parsial dapat diketahui bahwa variabel tangibles dan reliability, tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakat pembiayaan UMKM. Sedangkan variable.

6. Gunawan (2023) dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Produk KUR Mikro di BSI Outlet Kepahiang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator Responsiveness tangibles, reliability, responsiveness, dan assurance berpengaruh positif terhadap kualitas pelayanan pelaku UMKM.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Tahun	Judul	Hasil	Perbedaan	Persamaan
1.	Ulfa & Mulyadi (2020)	Analisis Dampak Kredit Usaha Rakyat pada Sektor Usaha Mikro terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kota Makassar	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan KUR memberikan dampak positif dalam pengembangan usaha mikro di Kota Makassar, sementara perkembangan usaha mikro juga memberikan dampak positif dalam upaya penanggulangan kemiskinan	Informan terdiri dari pejabat di Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, pelaku usaha, serta tokoh masyarakat yang terlibat secara langsung.	Sama-sama meneliti tentang UKM dan KUR

No	Nama Tahun	Judul	Hasil	Perbedaan	Persamaan
2.	Iztihar & Ashar, (2018)	Kredit Usaha Rakyat dan Perkembangan UMKM di Kabupaten Simeulue Pasca Covid-19	Penyaluran dana KUR telah menunjukkan dampak positif yang signifikan terhadap perkembangan UMKM, yang tercermin dari peningkatan jumlah UMKM, tenaga kerja yang terserap, dan nilai produksi UMKM, serta pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).	Pemerintah telah meluncurkan berbagai program, termasuk program Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Sama-sama meneliti tentang UKM dan KUR
3.	Akbar Agung Maesya (2020)	Implementasi Kebijakan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Bank BRI di Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak	Hasil penelitian menunjukkan hubungan Implementasi kebijakan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Warunggunung	Perbedaannya terletak pada focus variable implementasi kebijakan, teori yang digunakan menurut Merilee S. Grindle yaitu isi kebijakan dan lingkungan implementasi	Persamaan terletak pada penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif

			g Kabupaten Lebak belum optimal		
4.	Betria Intan Nuraffia ti (2023)	Analisis Produk KUR dan kualitas Pelayanan Dalam Meningkatka n Minat Menjadi Nasabah	Dengan hasil penelitian Kepuasan dan kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap loyalitas nasabah	Perbedaan terletak pada fokus yang diteliti yaitu analisis produk KUR dan kualitas pelayanan	Persamaan terletak pada indikator kualitas pelayanan, teori yang digunakan teori parassuraman yaitu tangibles, reliability, responsivenes s, assurance, dan empathy
5.	Rahayu Budiarto (2020)	Efektifitas Implementasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Oleh Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Makassar Tamalanrea	Hasil Penelitian menunjukkan pada indikator responsivenes s, assurance, dan empathy berpengaruh positif pada pembiayaan KUR	Perbedaanny a pada focus penelitian yang diteliti yaitu efektifitas implementas i KUR, teori yang digunakan menurut Matland (1995) yaitu Ketepatan Kebijakan, Ketepatan Pelaksana, Ketepatan Target, dan Ketepatan Lingkungan	Persamaan terletak pada indikator kualitas pelayanan dan metode penelitian deskriptif pendekatan kualitatif

No	Nama Tahun	Judul	Hasil	Perbedaan	Persamaan
6.	Randi Gunawan (2023)	Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Produk KUR Mikro di BSI Outlet Kepahiang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator responsiveness, tangibles, Reliability, Assurance dan Empathy berpengaruh positif terhadap kualitas pelayanan pelaku UMKM	Perbedaan terlihat pada fokus yang diteliti yaitu Kualitas pelayanan dan Produk KUR Mikro	Persamaan terletak pada variabel kualitas pelayanan dan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif

Dalam penelitian terdahulu lebih banyak membahas tentang program KUR di Bank pemerintah dan implikasi terhadap kepuasan nasabah terutama. Beberapa terlihat dari fokus yang diteliti serta teori yang digunakan, dalam penelitian terdahulu belum adanya yang membahas mengenai kualitas pelayanan UMKM pada Bank Swasta

2.5 Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran yang didasarkan pada pertimbangan berbagai ide saat ini dan temuan penelitian sebelumnya diperlukan untuk memberikan landasan teoretis yang dapat diterima untuk dipelajari. Kerangka konseptual ini perlu dioperasionalkan agar dapat diukur dan dimengerti. Akibatnya, model berikut dapat digunakan untuk menentukan kerangka konseptual yang digunakan dalam penyelidikan ini.

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian merupakan adalah prosedur sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian atau mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Metode penelitian melibatkan langkah-langkah yang terorganisir dan logis yang diikuti oleh peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena yang diteliti (Jaya, 2020). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. ementara itu, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia (Moleong, 2016)

Pendekatan penelitian merupakan sebuah rancangan bagaimana suatu penelitian akan dilakukan. Rancangan tersebut digunakan untuk mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang di rumuskan. Jenis penelitian yang digunakan

dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif atau penelitian penjelasan yaitu penelitian yang menganalisa hubungan antara variabel-variabel penelitian dan hipotesis yang harus di buktikan.

Metode-metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengkaji hal ihwal tertentu secara mendalam dan rinci. Metode-metode ini menghasilkan sejumlah kecil orang dan kasus. Hal ini meningkatkan pemahaman terhadap kasus-kasus dan situasi itu, namun juga mengurangi kemungkinan generalisasi. Dalam penelitian kualitatif peneliti adalah instrumen. Validitas dan metode-metode kualitatif banyak bergantung pada keterampilan, kemampuan, dan kecermatan yang melakukan kerja lapangan (Sugiyono, 2020).

3.2 Jenis Metode Penelitian

Jenis penelitian dapat dibedakan berdasarkan tujuan, pendekatan, dan metode yang digunakan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis Penelitian Lapangan (*Field Research*). Menurut Arikunto penelitian lapangan, atau *field research*, adalah metode penelitian yang dilakukan di lapangan atau lingkungan yang relevan dengan objek penelitian. Penelitian lapangan melibatkan pengumpulan data dan informasi secara langsung dari sumbernya, seperti observasi langsung, wawancara, survei, pengukuran, dan pengambilan sampel. Metode ini sering digunakan dalam berbagai disiplin ilmu,

termasuk sosiologi, antropologi, geografi, biologi, dan ilmu lingkungan (Sekaran, 2019)

3.3 Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan Bulan Juni 2024

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini adalah di Bank Aceh Kabupaten Bireun.

Pihak Peminjam KUR Kabupaten Bireun.

3.4 Informan Penelitian

Informan merupakan orang yang bisa memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Adapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*.

Kriteria informan dari pemilik usaha mikro

- a. Pemilik usaha dan sudah menjalankan usaha mikro selama minimal 1 tahun.
- b. Menerima Kredit Usaha Rakyat (KUR).
- c. Memiliki pengetahuan tentang proses pengajuan dan penggunaan KUR.
- d. Bersedia berbagi informasi dan pengalaman secara terbuka.

Kriteria informan dari Petugas KUR

1. Bertugas sebagai penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR).

2. Memiliki pengalaman minimal 2 tahun dalam memberikan layanan kredit, khususnya KUR.
3. Mengetahui prosedur dan kebijakan terkait pelaksanaan KUR.
4. Bersedia menjadi Informan

Tabel 3.1 Jenis Usaha Mikro Informan dan jumlah Pinjaman

No	Jenis Usaha Mikro	Jumlah Pinjaman KUR (Rp)
1	Usaha Makanan	15.000.000
2	Usaha Minuman	12.000.000
3	Usaha Pertanian	20.000.000
4	Usaha Kerajinan Tangan	10.500.000
5	Usaha Perdagangan	25.000.000
6	Usaha Jasa	18.000.000
7	Usaha Kecil Retail	14.000.000
8	Usaha Peternakan	30.000.000
9	Usaha Fashion	22.000.000
10	Usaha Katering	35.000.000
11	Usaha Pembuatan Roti	11.000.000
12	Usaha Sewa Kendaraan	40.000.000
13	Usaha Salon	13.500.000
14	Usaha Fotografi	10.000.000
15	Usaha Digital Marketing	15.500.000
16	Usaha Cuci Mobil	20.000.000
17	Usaha Kebun Sayur	12.500.000
18	Usaha Penyewaan Alat	50.000.000
19	Usaha Ternak Ikan	45.000.000
20	Usaha Jasa Kebersihan	30.000.000

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, di mana

cara tersebut menunjukkan pada suatu yang abstrak, tidak dapat di wujudkan dalam benda yang kasat mata, tetapi dapat dipertontonkan penggunaannya. Dalam hal pengumpulan data ini, penulis terjun langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan data yang valid, maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi ini menggunakan observasi partisipasi, di mana peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Observasi ini dilakukan dengan cara mengamati apa yang sedang dipelajari, dan hasilnya berupa lapangan, sikap, perilaku, percakapan, dan hubungan interpersonal (Mekarisce, 2020)

Adapun lapangan yang di maksud adalah dimana dan bagaimana kondisi di lokasi penelitian, adapun sikap yang di masuk adalah melihat bagaimana karakteristik baik itu populasi maupun sampel dalam penelitian ini, selanjutnya peneliti juga melihat bagaimana berperilaku dalam keseharian mereka baik itu populasi maupun sampel, baaimana mereka berkomunikasi di dalam fase

observasi ini juga dilihat yang selanjutnya bisa menjadi acuan awal dan melanjutkan penelitian

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Wawancara adalah suatu proses pemberian pertanyaan yang dilakukan oleh peneliti kepada responden untuk mendapatkan jawaban dan mengetahui beberapa hal guna melengkapi data yang diperlukan dalam penelitiannya. Dalam penelitian ini peneliti nantinya akan melakukan wawancara kepada beberapa pihak yang benar-benar paham akan masalah penelitian, diantaranya adalah unsur pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat istiadat dan masyarakat transmigrasi itu sendiri. Bentuk dialog yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan informasi dari responden disebut wawancara. Dalam prakteknya, pewawancara sudah menyiapkan beberapa pertanyaan kepada yang diwawancarai dan sudah membawa pemandu. Prasyarat untuk wawancara semacam itu adalah bahwa pewawancara perlu memantau data yang dikumpulkan (Pujaastawa, 2016)

Jadi, peneliti sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang lengkap mengenai relasi sosial masyarakat transmigrasi dengan penduduk lokal yang ada di lokasi penelitian. Sedangkan informan dalam penelitian ini berjumlah 21 orang informan. Adapun informan yang di wawancarai dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut.

- a. 20 (dua puluh) orang pemilik usaha mikro.
- b. 1 (satu) orang petugas Bank Aceh

3. Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Dalam pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden. Teknik ini berguna untuk melengkapi data tambahan dalam penelitian, seperti foto saat wawancara dengan informan, dan berbagai literatur yang digunakan dalam penelitian ini. Agar data yang di peroleh dapat lebih jelas maka peneliti mengumpulkan foto-foto, menulis data pribadi para informan, memberi gambaran tentang lokasi penelitian dan beberapa data yang di anggap penting dalam mendukung penelitian ini (Hartono, 2018)

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya mengelola data dengan mengumpulkan data, memilah-milah dan menemukan pola (*finding a patter*), menemukan apa yang penting dan apa yang diperlukan, menguji kembali (*verification*), dan memutuskan kesimpulan (*tentative conclusion*). (Komariah & Satori, 2011)

Metode yang digunakan adalah kualitatif yaitu metode dalam mengolah data-data yang telah dikumpulkan dengan menganalisisnya sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan dengan analisa data kualitatif berupa reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan dan verifikasi (I. Gunawan, 2014)

a) Reduksi Data.

Data yang diperoleh dari lapangan dikumpulkan kemudian direduksi untuk memilah data pokok yang penting yaitu yang berkaitan dengan fokus tema penelitian. Kemudian data tersebut disusun secara sistematis agar mudah untuk difahami sehingga pemahaman ini akan membantu menjawab pertanyaan baru berkaitan dengan tema penelitian. Reduksi data adalah proses penting dalam analisis data yang bertujuan untuk mengurangi kompleksitas data dengan tetap mempertahankan informasi yang relevan dan signifikan. Tujuan utamanya adalah untuk menyederhanakan dataset

sehingga lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan tanpa kehilangan informasi penting. Ada beberapa teknik reduksi data yang umum digunakan, termasuk pemilihan fitur, ekstraksi fitur, dan transformasi fitur. Pertama, pemilihan fitur melibatkan identifikasi dan pemilihan fitur atau variabel yang paling berpengaruh dalam memprediksi atau menjelaskan variabel target. Ini membantu mengurangi dimensi dataset dengan menghilangkan fitur yang kurang relevan atau tidak penting. Kedua, ekstraksi fitur adalah proses mengonversi atau mentransformasi data mentah menjadi fitur-fitur baru yang lebih informatif. Misalnya, teknik seperti analisis faktor atau analisis komponen utama digunakan untuk menggabungkan informasi dari beberapa fitur menjadi satu atau beberapa fitur yang lebih deskriptif. Terakhir, transformasi fitur melibatkan penyesuaian atau perubahan skala data asli untuk meningkatkan interpretasi atau kinerja analisis. Ini termasuk transformasi logaritmik, standarisasi, atau normalisasi data. Melalui reduksi data, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang struktur data, mengurangi kelebihan dimensi, meningkatkan kinerja analisis, dan memfasilitasi proses pengambilan keputusan dengan menyediakan representasi data yang lebih ringkas dan informatif.

b) Data Display/Penyajian Data.

Data display adalah data yang telah mengalami proses reduksi yang langkah selanjutnya adalah melakukan penyajian data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, maupun diagram. Tujuan penyajian data disini adalah untuk mempermudah dalam memahami hal yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan hal-hal yang telah difahami tersebut. Data yang didapat kemudian dijelaskan hubungannya dengan data yang lain sehingga terbentuk suatu korelasi data terkait permasalahan penelitian.

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data memegang peranan krusial dalam menggambarkan temuan dan hasil analisis dari data yang telah dikumpulkan. Berbeda dengan pendekatan kuantitatif yang cenderung menggunakan tabel dan grafik untuk menyajikan data numerik, pendekatan kualitatif lebih sering mengandalkan teknik penyajian yang lebih deskriptif dan naratif. Salah satu metode penyajian yang umum adalah melalui kutipan langsung dari partisipan atau narasumber, yang memberikan wawasan mendalam tentang pandangan dan pengalaman individu terlibat. Selain itu, data kualitatif sering diorganisir ke dalam kategori dan tema yang mencerminkan pola atau temuan

yang muncul dari analisis. Diagram konseptual dan matriks juga digunakan untuk memvisualisasikan hubungan antara konsep-konsep atau tema yang berbeda. Grafik naratif, sebagai metode lainnya, menggabungkan elemen visual dengan narasi untuk menyampaikan temuan dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Melalui berbagai teknik ini, penelitian kualitatif dapat menyajikan temuan secara mendalam dan deskriptif, memfasilitasi interpretasi dan pemahaman yang lebih baik terhadap konteks dan makna data yang dianalisis.

c) Menarik Kesimpulan dan Verifikasi.

Menarik kesimpulan dan verifikasi adalah tahapan penting dalam proses penelitian yang mengikuti pengumpulan dan analisis data. Setelah data dikumpulkan dan dianalisis, peneliti perlu merumuskan kesimpulan yang valid dan teruji dari hasil penelitian. Proses menarik kesimpulan melibatkan identifikasi temuan utama atau pola yang muncul dari data yang telah dianalisis. Kesimpulan tersebut harus didukung oleh bukti yang jelas dan relevan yang ditemukan selama proses penelitian. Penting bagi peneliti untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil memperhitungkan konteks, kompleksitas, dan variasi dalam data. Setelah kesimpulan ditarik, langkah berikutnya adalah verifikasi, yang mencakup evaluasi

ulang terhadap keabsahan dan keandalan kesimpulan yang diambil. Verifikasi dapat dilakukan melalui beberapa cara, termasuk pembuktian kembali data, triangulasi dengan sumber data lain, dan pengujian ulang terhadap temuan dengan menggunakan kerangka konseptual atau teori yang relevan. Proses verifikasi bertujuan untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil sesuai dengan fakta yang ada dan dapat dipercaya. Selain itu, dalam konteks penelitian kualitatif, refleksi diri juga merupakan bagian penting dari menarik kesimpulan dan verifikasi. Peneliti harus mengenali dan mengakui bias atau asumsi yang mungkin mempengaruhi interpretasi mereka terhadap data. Dengan mempertimbangkan kembali pandangan mereka sendiri dan memeriksa ulang temuan mereka secara kritis, peneliti dapat memastikan bahwa kesimpulan yang diambil mencerminkan interpretasi yang akurat dan obyektif dari data penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Bireun terletak di bagian utara Provinsi Aceh, dengan luas wilayah sekitar 1.901,21 kilometer persegi. Secara geografis, kabupaten ini berbatasan dengan Selat Malaka di sebelah utara, Kabupaten Aceh Utara di sebelah timur, Kabupaten Aceh Tengah di sebelah selatan, dan Kabupaten Pidie di sebelah barat. Populasi Kabupaten Bireun pada tahun 2021 tercatat mencapai sekitar 409.337 jiwa, dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Perekonomian Kabupaten Bireun sebagian besar digerakkan oleh sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Komoditas unggulan daerah ini antara lain kopi, kelapa sawit, karet, serta hasil laut seperti ikan dan udang. Selain itu, pariwisata juga menjadi salah satu sektor yang terus dikembangkan, dengan objek wisata alam dan budaya yang menarik. Dari segi sosial budaya, masyarakat Kabupaten Bireun kaya akan tradisi dan adat istiadat, seperti Peusijek, Meugang, dan Kenduri.

Kemiskinan di Kabupaten Bireun merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tingkat pendidikan, akses terhadap layanan kesehatan, dan peluang kerja. Meskipun Bireun memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, seperti pertanian dan perikanan, banyak masyarakat yang masih terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Rendahnya tingkat pendidikan sering kali menjadi penghalang bagi masyarakat

untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga mereka tidak memiliki cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Selain itu, akses yang terbatas terhadap layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas memperburuk situasi kemiskinan, menyebabkan banyak keluarga tidak mampu meningkatkan taraf hidup mereka.

Di sisi lain, upaya pemerintah daerah dalam mengatasi kemiskinan di Bireuen telah menunjukkan beberapa kemajuan, namun masih memerlukan perhatian lebih. Program-program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan dan bantuan usaha mikro, perlu diperluas dan ditingkatkan efektivitasnya. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil sangat penting untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan. Dengan meningkatkan infrastruktur, akses pendidikan, dan layanan kesehatan, diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Bireuen secara keseluruhan.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Dampak Pemberian KUR Terhadap Usaha Mikro Dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bireun pada Pengembangan Usaha

1. Dampak Pemberian KUR dalam Pengembangan Usaha

Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah menjadi salah satu program vital dalam pemberian akses permodalan bagi usaha mikro di Kabupaten Bireun, berperan penting dalam upaya pengurangan tingkat kemiskinan. Melalui KUR, pelaku usaha mikro mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pinjaman dengan bunga yang terjangkau, yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan usaha, meningkatkan kapasitas produksi, dan memenuhi permintaan pasar. Dampak positif dari program ini tidak hanya terlihat pada peningkatan pendapatan individu, tetapi juga pada penguatan ekonomi lokal secara keseluruhan, yang pada gilirannya berkontribusi pada pengentasan kemiskinan di daerah tersebut.

Hasil wawancara dengan petugas Bank Aceh terkait apakah KUR berdampak pada UMKM dalam pengembangan usaha dan mengurangi kemiskinan.

"Benar sekali, KUR memang menjadi sumber permodalan yang sangat penting bagi UMKM. Banyak pelaku usaha yang sebelumnya kesulitan mendapatkan modal kini bisa memanfaatkan KUR dengan bunga yang lebih terjangkau. Dengan modal ini, mereka dapat memperluas usaha, seperti menambah stok barang dagangan. Ini sangat membantu mereka untuk memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat."

Hasil wawancara dengan petugas Bank menunjukkan bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah menjadi sumber permodalan yang krusial bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Banyak pelaku usaha yang sebelumnya mengalami kesulitan dalam memperoleh modal kini dapat memanfaatkan KUR dengan suku bunga

yang lebih terjangkau. Dengan adanya akses ke modal ini, mereka mampu memperluas usaha mereka, termasuk menambah stok barang dagangan. Hal ini sangat berkontribusi dalam memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat, sehingga mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha mereka. KUR tidak hanya memberikan peluang bagi pelaku UMKM, tetapi juga berperan penting dalam pengurangan kemiskinan dan peningkatan ekonomi lokal

Selanjutnya, KUR juga berdampak pada peningkatan produktivitas dan omzet UMKM. Dengan modal yang lebih memadai, para pelaku UMKM dapat meningkatkan kapasitas produksi, mengadopsi teknologi yang lebih efisien, serta melakukan diversifikasi produk. Sebagai contoh, seorang informan yang bergerak di bidang perdagangan mengatakan bahwa KUR telah memungkinkannya untuk memperluas jenis barang yang dijual, sehingga dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Hal ini pada akhirnya berdampak pada peningkatan pendapatan dan keuntungan usaha. Seperti yang disebutkan langsung oleh pelaku UMKM berikut :

“Saya merasakan dampak yang sangat positif dari KUR. Dengan modal yang saya peroleh, saya bisa memperluas jenis barang yang dijual di toko saya. Sebelumnya, saya hanya menjual beberapa produk, tetapi sekarang saya bisa menawarkan lebih banyak pilihan. Ini membantu saya menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan omzet secara signifikan. Pendapatan saya meningkat, dan saya merasa lebih stabil secara finansial”

KUR juga mendorong peningkatan kualitas dan daya saing produk UMKM. Dengan adanya dukungan permodalan, pelaku

UMKM dapat melakukan investasi untuk meningkatkan kualitas bahan baku, teknologi produksi, serta kemasan produk. Salah satu informan yang bergerak di bidang makanan olahan menyatakan bahwa KUR telah memungkinkannya untuk mengembangkan kemasan yang lebih menarik dan modern, sehingga produknya dapat bersaing di pasar yang semakin kompetitif.

Dampak lain yang juga teridentifikasi adalah peningkatan kapasitas manajerial dan kewirausahaan pelaku UMKM. Dalam proses pengajuan dan pengelolaan KUR, para pelaku UMKM dituntut untuk menyusun rencana bisnis, melakukan pencatatan keuangan, serta menerapkan praktik-praktik manajemen yang lebih baik. Hal ini tidak hanya meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola usaha, tetapi juga mendorong tumbuhnya budaya kewirausahaan yang lebih profesional. Dalam penelitian ini tidak ditemukan pemberian KUR yang tidak tepat sasaran karena semua persyaratan dari pihak penyalur KUR harus dipenuhi sehingga pengajuan KUR dapat di *approve* oleh pihak penyalur dalam hal ini Bank Aceh Syariah.

2. Dampak Pemberian KUR dalam Mengurangi Kemiskinan

Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya pengurangan kemiskinan di Indonesia, termasuk di Kabupaten Bireun. Dengan memberikan akses permodalan yang lebih mudah dan terjangkau bagi pelaku usaha mikro dan kecil, KUR berperan dalam meningkatkan kapasitas produksi dan pendapatan. Program ini tidak hanya

membantu individu untuk keluar dari jeratan kemiskinan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Melalui berbagai inisiatif yang didukung oleh KUR, pelaku usaha dapat mengembangkan usaha mereka, mengadopsi inovasi, dan pada akhirnya, berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Hasil wawancara dengan petugas Bank sebagai pihak pemberi KUR terkait dengan dampak yang ingin di capai dari pemberian KUR terhadap kemiskinan adalah sebagai berikut:

“Kami sangat berharap bahwa pemberian KUR dapat berkontribusi signifikan dalam mengurangi kemiskinan di Kabupaten Bireun. Dengan memberikan akses permodalan yang lebih baik, kami percaya banyak pelaku usaha mikro yang sebelumnya terjebak dalam keterbatasan finansial dapat memanfaatkan dana ini untuk mengembangkan usaha mereka. Ketika usaha mereka berkembang, pendapatan mereka juga meningkat, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup mereka dan keluarga. Ini adalah langkah penting untuk menciptakan komunitas yang lebih sejahtera”

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kabupaten Bireun diharapkan dapat berkontribusi signifikan dalam mengurangi kemiskinan dengan memberikan akses permodalan yang lebih baik bagi pelaku usaha mikro. Melalui dana ini, pelaku usaha yang sebelumnya mengalami keterbatasan finansial memiliki peluang untuk mengembangkan usaha mereka, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup mereka serta keluarga. Dengan demikian, KUR menjadi langkah penting dalam menciptakan komunitas yang lebih sejahtera dan berkelanjutan.

Dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Bireun, pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah memberikan dampak yang signifikan pada usaha mikro di daerah tersebut. Berdasarkan hasil identifikasi, pemilik usaha mikro yang menerima KUR mengalami perubahan sosial-ekonomi yang positif. Mereka mampu memperluas usahanya, meningkatkan omzet penjualan, dan menambah jumlah karyawan. Hal ini secara langsung berdampak pada peningkatan pendapatan, sehingga para pemilik usaha mikro dapat memenuhi kebutuhan dasar keluarga dan meningkatkan kesejahteraan. Selain itu, pemberian KUR juga telah mendorong tumbuhnya jiwa kewirausahaan di kalangan masyarakat, serta mendukung diversifikasi usaha dan peningkatan daya saing pelaku usaha mikro di Kabupaten Bireun. Dengan demikian, program pemberian KUR terbukti efektif dalam membantu pengentasan kemiskinan di daerah tersebut. Untuk menilai dampak pemberian KUR terhadap usaha mikro dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Bireun, dengan mengidentifikasi perubahan sosial-ekonomi yang terjadi pada pemilik usaha mikro yang menerima KUR maka diajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Motivasi Mengajukan KUR

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pemilik usaha mikro di Kabupaten Bireun yang menerima Kredit Usaha Rakyat (KUR), dapat disimpulkan beberapa hal terkait dengan motivasi mereka dalam mengajukan KUR:

Salah satu motivasi utama bagi pemilik usaha mikro untuk mengajukan KUR adalah kebutuhan akan modal tambahan guna mengembangkan usahanya. Para pelaku usaha mikro umumnya menghadapi kendala permodalan dalam meningkatkan skala dan jangkauan bisnisnya. Modal awal yang terbatas serta kesulitan mengakses sumber pembiayaan formal seperti perbankan menjadi tantangan yang sering dihadapi. Dengan adanya program KUR, mereka mendapatkan akses yang lebih mudah untuk memperoleh pinjaman kredit dengan prosedur yang relatif sederhana dan bunga yang terjangkau. Hal ini memberikan kesempatan bagi para pelaku usaha mikro untuk memperluas kapasitas produksi, menambah stok barang dagangan, serta meningkatkan cakupan pemasaran produk dan jasa mereka.

Selain itu, motivasi lain yang mendorong para pemilik usaha mikro untuk mengajukan KUR adalah keinginan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha. Dana KUR yang diperoleh dimanfaatkan untuk melakukan investasi dalam bentuk pembelian mesin, peralatan, atau teknologi baru yang lebih modern. Investasi ini tidak hanya meningkatkan output produksi, tetapi juga membantu meningkatkan kualitas produk dan layanan yang diberikan. Dengan demikian, usaha mikro dapat lebih berdaya saing di pasar dan mampu memenuhi permintaan konsumen secara lebih optimal.

Motivasi lain yang mendorong pengajuan KUR adalah keinginan untuk melakukan diversifikasi usaha. Sebagian pemilik

usaha mikro memanfaatkan KUR untuk membuka cabang atau unit usaha baru, baik di sektor yang sama maupun melakukan diversifikasi ke bidang usaha lain. Hal ini dilakukan untuk memperluas pangsa pasar, meningkatkan pendapatan, serta memperkuat ketahanan usaha terhadap risiko dan gejolak ekonomi. Dengan adanya KUR, para pelaku usaha mikro memiliki akses pembiayaan yang lebih luas untuk mewujudkan rencana pengembangan usahanya.

Selain itu keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Bagi sebagian pemilik usaha mikro, KUR dipandang sebagai instrumen yang dapat membantu meningkatkan pendapatan dan taraf hidup mereka. Dana KUR yang diterima tidak hanya digunakan untuk keperluan bisnis, tetapi juga dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan mendasar keluarga, seperti biaya pendidikan anak, perawatan kesehatan, perbaikan rumah, dan lain-lain. Dengan demikian, program KUR tidak hanya berdampak pada pengembangan usaha, tetapi juga memberikan manfaat secara sosial-ekonomi bagi keluarga pemilik usaha mikro.

Selanjutnya motivasi lain yang mendorong pengajuan KUR adalah faktor dukungan dan dorongan dari lingkungan sekitar, seperti keluarga, teman, maupun kelompok usaha. Adanya informasi dan rekomendasi positif dari pihak-pihak tersebut mengenai manfaat dan kemudahan akses KUR turut mempengaruhi keputusan para pemilik usaha mikro untuk

mengajukan kredit. Mereka melihat KUR sebagai solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan permodalan dan mewujudkan rencana pengembangan usaha.

Secara keseluruhan, motivasi utama pengajuan KUR oleh pemilik usaha mikro di Kabupaten Bireun berpusat pada tiga hal: (1) kebutuhan akan tambahan modal untuk pengembangan usaha, (2) keinginan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing, serta (3) upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Faktor pendukung lainnya adalah adanya dukungan dan rekomendasi dari lingkungan sekitar. Motivasi-motivasi tersebut menunjukkan bahwa program KUR telah menjadi instrumen yang efektif dalam memfasilitasi kemajuan dan keberlanjutan usaha mikro, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bireun.

Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Bank Aceh Syariah yang dimulai pada tahun 2022 berkontribusi pada penurunan persentase kemiskinan di Kabupaten Bireun. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa persentase kemiskinan menurun dari 13,25% pada tahun 2021 menjadi 12,51% pada tahun 2022, dan terus berlanjut hingga mencapai 12,10% pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan dampak positif dari KUR, yang memberikan akses permodalan kepada pelaku UMKM, memungkinkan mereka untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan. Namun, penurunan kemiskinan ini tidak dapat sepenuhnya diatributkan kepada KUR

saja. Faktor lain, seperti peningkatan infrastruktur, program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, serta pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut, juga berkontribusi signifikan. Dengan kata lain, KUR merupakan salah satu elemen penting dalam upaya pengurangan kemiskinan, tetapi kesuksesan ini adalah hasil dari sinergi berbagai faktor yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

3. Pemanfaatan Dana KUR

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pemilik usaha mikro di Kabupaten Bireun yang telah menerima Kredit Usaha Rakyat (KUR), dapat disimpulkan beberapa hal terkait dengan pemanfaatan dana KUR yang mereka terima:

Pertama, sebagian besar pemilik usaha mikro memanfaatkan dana KUR untuk memperkuat modal kerja usahanya. Dana pinjaman digunakan untuk menambah stok barang dagangan, bahan baku, atau persediaan supplies yang dibutuhkan dalam proses produksi. Dengan tambahan modal ini, mereka dapat meningkatkan volume dan frekuensi transaksi penjualan, sehingga mampu memperluas pangsa pasar dan meningkatkan pendapatan usaha. Misalnya, seorang pedagang kelontong memanfaatkan KUR untuk menambah persediaan barang-barang konsumsi harian yang dijualnya, sementara seorang pengrajin mebel menggunakan KUR untuk membeli bahan kayu dan komponen lain dalam jumlah yang lebih besar.

Upaya ini sangat membantu meningkatkan ketersediaan produk dan memenuhi permintaan pasar secara lebih efektif.

Selain itu, sebagian pemilik usaha mikro juga mengalokasikan dana KUR untuk melakukan investasi dalam bentuk pembelian aset produktif, seperti mesin, peralatan, dan teknologi baru. Investasi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, efisiensi, serta kualitas produksi. Misalnya, seorang pengusaha pembuatan tahu menggunakan dana KUR untuk membeli mesin pengolah tahu yang lebih modern, sementara seorang pemilik warung makan menggunakannya untuk membeli peralatan memasak yang lebih canggih. Dengan adanya investasi ini, produktivitas dan kualitas produk/jasa yang dihasilkan dapat ditingkatkan, sehingga usaha menjadi lebih berdaya saing di pasar. Selain itu, investasi aset produktif juga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi keberlangsungan usaha mikro.

Tidak hanya untuk modal kerja dan investasi aset, sejumlah pemilik usaha mikro juga memanfaatkan dana KUR untuk melakukan diversifikasi usaha. Mereka menggunakan dana pinjaman untuk membuka cabang atau unit usaha baru, baik di sektor yang sama maupun melakukan perluasan ke bidang usaha lain. Misalnya, seorang pemilik toko kelontong menggunakan KUR untuk membuka cabang toko di lokasi baru, sementara seorang pengusaha mebel memanfaatkannya untuk membuka unit usaha di bidang kontraktor furniture. Upaya diversifikasi ini bertujuan untuk memperluas pangsa pasar, meningkatkan

pendapatan, serta memperkuat ketahanan usaha terhadap risiko dan gejolak ekonomi. Dengan adanya KUR, para pelaku usaha mikro memiliki akses pembiayaan yang lebih luas untuk mewujudkan rencana pengembangan usahanya.

Selain itu, sebagian pemilik usaha mikro juga menggunakan dana KUR untuk membiayai kebutuhan operasional usaha lainnya, seperti pembayaran sewa tempat usaha, perbaikan atau renovasi fasilitas, serta pembayaran listrik, air, dan biaya transportasi. Meskipun bukan untuk tujuan produktif langsung, namun pembiayaan kebutuhan operasional ini tetap mendukung kelangsungan dan kelancaran aktivitas usaha mikro sehari-hari. Dengan terpenuhinya kebutuhan ini, para pelaku usaha dapat fokus pada proses produksi, pemasaran, serta pengembangan usaha.

Tidak hanya dimanfaatkan untuk kepentingan usaha, sebagian pemilik usaha mikro juga mengalokasikan dana KUR untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Misalnya, dana KUR digunakan untuk membiayai pendidikan anak, biaya kesehatan, perbaikan rumah, dan kebutuhan konsumsi rumah tangga lainnya. Meskipun tidak secara langsung terkait dengan pengembangan usaha, namun pembiayaan kebutuhan keluarga ini tetap memberikan manfaat tidak langsung bagi keberlangsungan usaha mikro. Dengan terpenuhinya kebutuhan keluarga, para pemilik usaha dapat lebih fokus dan tenang dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan dana KUR oleh pemilik usaha mikro di Kabupaten Bireun mencakup beberapa aspek, yaitu: (1) penguatan modal kerja, (2) investasi aset produktif, (3) diversifikasi usaha, (4) pembiayaan kebutuhan operasional, dan (5) pemenuhan kebutuhan keluarga. Masing-masing pemanfaatan tersebut memberikan kontribusi yang berbeda-beda bagi pengembangan dan keberlanjutan usaha mikro. Secara keseluruhan, dana KUR telah berhasil memfasilitasi para pemilik usaha mikro untuk melakukan berbagai upaya peningkatan kapasitas, produktivitas, dan daya saing usahanya, serta mendukung perbaikan kesejahteraan keluarga.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara juga ditemukan beberapa catatan penting terkait pemanfaatan dana KUR. Pertama, meskipun sebagian besar pemilik usaha mikro telah menggunakan dana KUR secara produktif, namun masih ada sebagian kecil yang memanfaatkannya untuk keperluan konsumtif, seperti untuk membeli kendaraan pribadi atau membiayai acara keluarga. Hal ini perlu menjadi perhatian agar dana KUR benar-benar digunakan sesuai dengan tujuan program, yaitu untuk pengembangan usaha. Kedua, sejumlah pemilik usaha mikro juga melaporkan adanya kesulitan dalam melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan terkait penggunaan dana KUR. Hal ini dapat menyulitkan mereka dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana pinjaman dan berdampak pada kemampuan memperoleh KUR di masa

mendatang. Dengan demikian, dibutuhkan upaya pendampingan dan pelatihan bagi para pelaku usaha mikro untuk meningkatkan kapasitas manajemen keuangan mereka.

Secara keseluruhan, pemanfaatan dana KUR oleh pemilik usaha mikro di Kabupaten Bireun telah memberikan dampak positif bagi pengembangan dan keberlanjutan usaha mereka. Namun, masih perlu dilakukan perbaikan dan pengawasan agar dana KUR benar-benar dimanfaatkan secara optimal dan sesuai dengan tujuan program

4. Tantangan dan Hambatan dalam memanfaatkan Dana KUR

Beberapa informan juga menyoroti beberapa tantangan dan kendala dalam mengakses dan memanfaatkan KUR. Misalnya, proses pengajuan pinjaman yang masih dianggap rumit, terutama bagi UMKM pemula atau yang belum memiliki track record yang baik. Selain itu, beberapa informan juga menyoroti perlunya peningkatan sinergi dan koordinasi antara lembaga perbankan, pemerintah, dan asosiasi UMKM dalam meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas program KUR. Temuan dari hasil wawancara ini menunjukkan bahwa KUR telah memberikan dampak positif yang cukup signifikan bagi pengembangan usaha UMKM di Indonesia. Namun, upaya-upaya untuk terus meningkatkan efektivitas dan aksesibilitas program KUR perlu dilakukan secara berkelanjutan, agar manfaat dan dampaknya dapat dirasakan oleh lebih banyak pelaku UMKM di seluruh Indonesia

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM dalam memanfaatkan dana KUR. Pertama dan yang paling mencolok adalah masih terdapatnya kerumitan dalam proses pengajuan dan pencairan pinjaman KUR. Beberapa informan menyatakan bahwa persyaratan administratif yang diminta oleh pihak bank cukup rumit, terutama bagi UMKM yang baru memulai usaha atau belum memiliki track record yang baik. Hal ini seringkali menjadi kendala bagi mereka untuk dapat mengakses pinjaman KUR secara mudah dan cepat.

Selain itu, informan juga menyoroti kurangnya sosialisasi dan informasi yang memadai mengenai persyaratan, tata cara, dan mekanisme pengajuan KUR. Banyak pelaku UMKM yang masih merasa kebingungan dan kurang memahami prosedur yang harus dilalui untuk mendapatkan pinjaman KUR. Keterbatasan informasi ini kemudian menyebabkan beberapa UMKM enggan untuk mengajukan permohonan pinjaman, karena khawatir akan ditolak atau tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Salah satu tantangan lain yang dihadapi adalah terkait dengan agunan atau jaminan yang diminta oleh pihak bank. Beberapa informan menyatakan bahwa mereka kesulitan untuk menyediakan aset yang dapat dijadikan jaminan, terutama bagi UMKM skala mikro dan kecil. Hal ini menjadi hambatan tersendiri, mengingat agunan merupakan salah satu persyaratan utama dalam pengajuan pinjaman KUR.

Selain itu, informan juga menyoroti mengenai besaran plafon pinjaman KUR yang dirasa masih terbatas, terutama bagi UMKM yang membutuhkan modal besar untuk ekspansi usaha. Beberapa informan mengungkapkan bahwa jumlah pinjaman KUR yang dapat mereka peroleh masih belum mencukupi untuk membiayai seluruh kebutuhan pengembangan usaha, sehingga mereka harus mencari sumber pendanaan lain yang lebih mahal. Tantangan lain yang juga teridentifikasi adalah terkait dengan tingkat bunga pinjaman KUR. Meski telah ditetapkan suku bunga yang relatif rendah, namun beberapa informan masih menganggap bahwa beban bunga tersebut masih cukup memberatkan, terutama di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Hal ini kemudian berdampak pada kemampuan pelaku UMKM untuk membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu.

Selain itu, beberapa informan juga menyoroti mengenai kurangnya pendampingan dan bimbingan teknis yang disediakan oleh pihak bank atau pemerintah terkait pengelolaan pinjaman KUR. Mereka merasa masih membutuhkan dukungan dan pendampingan dalam hal perencanaan, pencatatan, dan pengelolaan keuangan usaha agar dapat memanfaatkan pinjaman KUR secara optimal. Temuan dari hasil wawancara ini menunjukkan bahwa meskipun KUR telah memberikan banyak manfaat bagi pengembangan UMKM, namun masih terdapat sejumlah tantangan dan hambatan yang perlu diperhatikan dan diatasi secara komprehensif. Upaya-upaya untuk mempermudah akses,

meningkatkan sosialisasi, memperluas cakupan, serta menyediakan pendampingan yang memadai perlu dilakukan agar program KUR dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh lapisan pelaku UMKM di Indonesia.

5. Evaluasi terhadap keberlanjutan dan kesinambungan dampak Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada sektor usaha mikro terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Bireun

Selain tantangan dan hambatan dalam pemanfaatan dana KUR, evaluasi terhadap keberlanjutan dan kesinambungan dampak KUR pada sektor usaha mikro juga menjadi aspek penting yang perlu dikaji. Sebagai salah satu program pembiayaan yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan UMKM, KUR diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan di daerah-daerah, termasuk di Kabupaten Bireun. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mendalam mengenai sejauh mana KUR telah memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi sektor usaha mikro di wilayah tersebut, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan program KUR dalam menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat. Berikut adalah data terkait KUR di Bank Aceh Tahun 2020-2023

Tabel 4.1 Data KUR Bank Aceh Tahun 2020-2023

Indikator	2020	2021	2022	2023
Penyaluran KUR (Rp Triliun)	1,8	2,1	1,2	2,0
Jumlah Debitur (ribu)	58	67	38	45
Rasio NPL KUR (%)	1,8	1,5	1,6	1,4
Debitur Restrukturisasi (ribu)	12	12	-	10
Debitur Pelatihan dan Pendampingan (ribu)	-	3,5	-	5
Target Penyaluran KUR (Rp Triliun)	-	-	2,5	3,0

Sumber : Laporan Tahunan PT. Bank Aceh Syariah

Berdasarkan data yang disajikan, dapat dilihat bahwa penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Bank Aceh terus mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2021. Pada tahun 2020, penyaluran KUR mencapai Rp 1,8 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 58.000. Kemudian di tahun 2021, penyaluran KUR naik menjadi Rp 2,1 triliun dengan jumlah debitur meningkat menjadi 67.000. Meskipun di semester I tahun 2022 terjadi penurunan penyaluran KUR menjadi Rp 1,2 triliun dengan jumlah debitur 38.000, rasio Non-Performing Loan (NPL) KUR Bank Aceh tetap terjaga pada level yang rendah, yaitu 1,6%. Selama pandemi COVID-19 pada tahun 2020-2021, Bank Aceh telah melakukan restrukturisasi kredit KUR sebanyak 12.000 debitur. Selain itu, Bank Aceh juga secara rutin memberikan pelatihan dan pendampingan kepada debitur KUR, dengan jumlah debitur yang mendapatkan pelatihan pada tahun 2021 mencapai 3.500 debitur. Untuk tahun 2022, Bank Aceh menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp 2,5 triliun dan untuk tahun 2023 angka ini ditargetkan menjadi Rp 3 triliun.

Untuk mengetahui Evaluasi terhadap keberlanjutan dan kesinambungan dampak Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada sektor usaha mikro terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Bireun diajukan beberapa pertanyaan dengan fokus sebagai berikut

a. Evaluasi Efektivitas Program KUR

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas program Kredit Usaha Rakyat (KUR) masih belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat. Meskipun program KUR telah dijalankan selama beberapa tahun, masih terdapat beberapa kendala dan tantangan yang dihadapi, baik dari sisi penyaluran maupun pemanfaatan kredit oleh debitur.

Salah satu permasalahan utama yang diidentifikasi adalah keterbatasan akses masyarakat, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah-daerah terpencil. Meskipun program KUR telah ditetapkan sebagai salah satu prioritas pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan, namun pada kenyataannya masih banyak UMKM yang belum memiliki akses yang memadai untuk mendapatkan kredit KUR. Beberapa responden menyampaikan bahwa prosedur pengajuan kredit yang rumit, persyaratan administrasi yang ketat, serta informasi yang kurang memadai menjadi kendala bagi mereka untuk mengakses program KUR.

Selain itu, rendahnya literasi keuangan di kalangan UMKM juga menjadi salah satu faktor yang menghambat

efektivitas program KUR. Banyak pelaku UMKM yang belum memahami dengan baik manfaat dan persyaratan kredit KUR, sehingga enggan untuk mengajukan kredit. Hal ini diperparah dengan masih adanya persepsi negatif di masyarakat terkait kredit, yang dianggap akan memberatkan usaha mereka.

Beberapa responden juga menyoroti mengenai keterbatasan jumlah plafon kredit KUR yang tersedia. Mereka menilai bahwa plafon kredit yang ditetapkan masih belum mencukupi untuk membiayai kebutuhan modal kerja atau investasi bagi UMKM. Selain itu, proses pencairan kredit yang terkadang memakan waktu lama juga menjadi keluhan bagi sebagian debitur. Di sisi lain, kualitas pembinaan dan pendampingan yang diberikan oleh pihak penyalur kredit KUR juga menjadi perhatian. Beberapa responden mengungkapkan bahwa pendampingan yang diterima masih belum optimal, sehingga mereka kesulitan dalam mengelola kredit dan mengembangkan usahanya. Padahal, pendampingan yang intensif dan berkesinambungan sangat diperlukan bagi UMKM agar dapat memanfaatkan kredit KUR secara efektif.

Selain itu, isu mengenai tingkat suku bunga kredit KUR juga menjadi pembahasan yang sering diangkat. Meskipun pemerintah telah menetapkan suku bunga yang relatif rendah, namun bagi sebagian UMKM, tingkat suku bunga tersebut masih dirasa cukup memberatkan, terutama bagi usaha-usaha yang memiliki margin keuntungan yang tipis. Hal ini juga

menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya minat UMKM untuk mengajukan kredit KUR. Dari segi penyaluran, beberapa responden juga menyoroti mengenai keterbatasan jumlah dan jangkauan jaringan bank-bank penyalur kredit KUR, terutama di daerah-daerah terpencil. Mereka menilai bahwa keberadaan bank-bank penyalur kredit KUR yang masih terbatas di beberapa wilayah menjadi salah satu hambatan bagi UMKM untuk mengakses program tersebut.

Mengenai kualitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di bank-bank penyalur KUR juga turut menjadi perhatian. Beberapa responden menyampaikan bahwa masih terdapat kesenjangan antara pemahaman dan kemampuan petugas bank dalam mengelola kredit KUR, khususnya dalam hal pemberian informasi, pendampingan, dan monitoring terhadap debitur. Berdasarkan berbagai permasalahan dan kendala yang teridentifikasi, dapat disimpulkan bahwa efektivitas program Kredit Usaha Rakyat (KUR) masih belum optimal. Meskipun program KUR telah memberikan kontribusi positif bagi peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan agar manfaat program KUR dapat dirasakan secara lebih luas dan optimal oleh masyarakat.

Untuk itu diperlukan upaya-upaya konkret dari pemerintah, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang

ada. Peningkatan akses, penyederhanaan prosedur, peningkatan literasi keuangan, serta penguatan kapasitas SDM di bank-bank penyalur kredit KUR merupakan beberapa prioritas yang perlu diperhatikan. Dengan demikian, diharapkan program KUR dapat lebih efektif dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di masa depan.

b. Rekomendasi untuk Meningkatkan Efektivitas dan Aksesibilitas KUR

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa rekomendasi penting untuk meningkatkan efektivitas dan aksesibilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Indonesia.

1. Perlu adanya peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengenai ketersediaan dan manfaat KUR. Hal ini penting untuk memastikan bahwa informasi terkait KUR dapat dengan mudah diakses dan dipahami oleh mereka yang membutuhkan.
2. Penyederhanaan proses pengajuan dan pencairan KUR sangat dibutuhkan. Saat ini, proses administrasi dan persyaratan yang terlalu rumit seringkali menjadi kendala bagi UMKM dalam mengakses KUR. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk mempermudah dan mempercepat prosedur pengajuan dan pencairan KUR,

- serta mengurangi persyaratan yang dianggap memberatkan bagi calon debitur.
3. Peningkatan koordinasi dan integrasi antara berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, perbankan, dan asosiasi UMKM, sangat diperlukan. Koordinasi yang lebih baik dapat membantu mengidentifikasi dan mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penyaluran KUR, serta memastikan bahwa program KUR dapat berjalan secara efektif dan efisien.
 4. Perlu adanya perluasan cakupan dan jenis usaha yang dapat dibiayai melalui KUR. Selama ini, fokus utama KUR masih cenderung pada sektor-sektor tertentu, seperti pertanian, perikanan, dan perdagangan. Namun, UMKM di berbagai sektor lainnya, seperti industri kreatif, pariwisata, dan jasa, juga membutuhkan akses pembiayaan yang lebih luas. Oleh karena itu, penyesuaian dan perluasan jenis usaha yang dapat dibiayai melalui KUR dapat meningkatkan aksesibilitas program ini bagi lebih banyak UMKM.
 5. Penguatan kapasitas dan kualitas layanan dari lembaga penyalur KUR, baik bank maupun lembaga keuangan non-bank, juga menjadi faktor penting. Peningkatan kompetensi dan keterampilan staf dalam memahami kebutuhan UMKM, serta kemampuan mereka dalam memberikan bimbingan dan pendampingan, dapat

meningkatkan kepercayaan dan kepuasan debitur terhadap layanan KUR.

6. Peningkatan sinkronisasi antara program KUR dengan inisiatif pemberdayaan UMKM lainnya, seperti pelatihan, pendampingan, dan pengembangan pasar, dapat memberikan dampak yang lebih komprehensif bagi pertumbuhan dan keberlanjutan usaha UMKM. Hal ini dapat membantu UMKM tidak hanya dalam mendapatkan akses pembiayaan, tetapi juga dalam meningkatkan kapasitas, produktivitas, dan daya saing mereka
7. Peningkatan pengawasan dan pemantauan terhadap penyaluran KUR juga penting untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi program. Hal ini dapat mencegah penyalahgunaan dan memastikan bahwa KUR benar-benar disalurkan kepada UMKM yang membutuhkan dan berpotensi untuk berkembang.
8. Penguatan sinergi antara program KUR dengan skema pembiayaan lainnya, seperti pembiayaan investasi, modal kerja, dan pembiayaan ekspor-impor, dapat memberikan solusi yang lebih komprehensif bagi kebutuhan pembiayaan UMKM. Melalui integrasi ini, UMKM dapat memperoleh akses pembiayaan yang sesuai dengan tahap dan kebutuhan pengembangan usahanya.

9. Peningkatan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta, termasuk perbankan dan lembaga keuangan non-bank, dalam pengembangan dan penyaluran KUR dapat mendorong inovasi dan efisiensi program. Sinergi ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti pengembangan produk, pemanfaatan teknologi digital, dan perluasan jangkauan layanan KUR.
10. Penguatan sistem penjaminan kredit yang lebih komprehensif dan efektif juga dapat meningkatkan aksesibilitas KUR bagi UMKM. Skema penjaminan yang lebih baik dapat membantu mengurangi risiko bagi lembaga penyalur KUR, sehingga mereka dapat lebih leluasa dalam menyalurkan kredit kepada UMKM yang memiliki profil risiko lebih tinggi, tetapi memiliki potensi yang baik.
11. Peningkatan integrasi antara program KUR dengan ekosistem digital, seperti platform e-commerce, aplikasi keuangan digital, dan solusi logistik, dapat memperluas jangkauan dan aksesibilitas KUR bagi UMKM, terutama yang berada di daerah terpencil atau sulit dijangkau. Hal ini dapat membantu UMKM dalam mengakses pembiayaan, memasarkan produk, dan mengelola operasi usahanya secara lebih efektif.
12. Pengembangan skema KUR yang lebih berorientasi pada hasil (outcome-based), seperti pembiayaan berdasarkan

kinerja usaha atau capaian target tertentu, dapat mendorong UMKM untuk lebih bertanggung jawab dan produktif dalam menggunakan dana KUR. Pendekatan ini dapat menciptakan insentif bagi UMKM untuk meningkatkan kinerja dan keberlanjutan usahanya.

13. Penguatan sistem pemantauan, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan terhadap program KUR juga sangat diperlukan. Hal ini dapat membantu mengidentifikasi dan mengatasi kendala-kendala yang muncul, serta mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan efektivitas dan aksesibilitas KUR di masa depan.

Secara keseluruhan, implementasi rekomendasi-rekomendasi tersebut dapat berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan efektivitas dan aksesibilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi UMKM di Kabupaten Bireun. Dengan pendekatan yang komprehensif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil, program KUR diharapkan dapat menjadi instrumen yang lebih responsif dan berdampak positif bagi pertumbuhan dan keberlanjutan usaha UMKM.

Selain mengajukan pertanyaan untuk pelaku usaha maka dilakukan juga pengumpulan data pada pihak yang memberikan KUR (Bank Aceh Syariah) dengan beberapa fokus pertanyaan yaitu

:

a. Tujuan dan Misi Lembaga Keuangan Bank Aceh dalam Menyediakan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Bank Aceh, sebagai salah satu lembaga keuangan terkemuka di Provinsi Aceh, memiliki tujuan dan misi yang jelas dalam menyediakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi masyarakat. KUR merupakan program pemerintah pusat yang bertujuan untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKM) yang produktif dan layak namun memiliki keterbatasan dalam hal pemenuhan persyaratan perbankan konvensional. Bagi Bank Aceh, pemberian KUR menjadi salah satu prioritas dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah dan pemberdayaan sektor UMKM di Aceh.

Tujuan utama Bank Aceh dalam menyediakan KUR adalah untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM yang membutuhkan modal kerja atau investasi usaha namun menghadapi kendala dalam memenuhi persyaratan kredit tradisional. Dalam perspektif Bank Aceh, KUR merupakan instrumen penting dalam mendorong inklusi keuangan dan mendukung kegiatan produktif masyarakat, terutama di sektor usaha mikro dan kecil. Dengan memberikan KUR, Bank Aceh bertujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan UMKM , yang pada gilirannya akan berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan di Aceh.

Selain itu, Bank Aceh juga memandang KUR sebagai salah satu wujud tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social*

responsibility) dalam mendukung program pembangunan ekonomi daerah yang dicanangkan oleh pemerintah. Dengan mengalokasikan sumber daya untuk menyalurkan KUR, Bank Aceh turut berpartisipasi dalam upaya memperkuat struktur perekonomian Aceh melalui pemberdayaan UMKM . Hal ini sejalan dengan visi dan misi Bank Aceh sebagai lembaga keuangan daerah yang berorientasi pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Aceh.

Dalam menjalankan misi penyaluran KUR, Bank Aceh memiliki beberapa fokus utama, antara lain:

1. Memperluas akses pembiayaan bagi UMKM yang belum memiliki akses memadai terhadap layanan perbankan konvensional. Melalui KUR, Bank Aceh berupaya menjangkau segmen masyarakat yang sebelumnya belum tersentuh oleh layanan kredit formal, terutama di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau atau terpencil.
2. Mendukung pertumbuhan dan pengembangan UMKM yang produktif dan layak usaha. Bank Aceh menyalurkan KUR kepada calon debitur yang memiliki prospek usaha yang baik, namun terkendala dalam hal pemenuhan jaminan atau persyaratan kredit tradisional. Dengan demikian, KUR diharapkan dapat menjadi katalis bagi UMKM untuk meningkatkan kapasitas, memperluas jaringan, dan mengembangkan usahanya.

3. Mendorong diversifikasi usaha dan kegiatan ekonomi produktif di Aceh. Selain memfasilitasi UMKM yang sudah berjalan, Bank Aceh juga mengalokasikan KUR untuk mendukung pengembangan usaha-usaha baru yang inovatif dan prospektif. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah untuk mendorong diversifikasi ekonomi dan mengurangi ketergantungan masyarakat Aceh pada sektor-sektor tertentu.
4. Menguatkan ketahanan ekonomi dan ketahanan pangan masyarakat Aceh. Dalam penyaluran KUR, Bank Aceh juga memberikan perhatian khusus pada pembiayaan bagi usaha-usaha di sektor pertanian, perikanan, dan industri pengolahan hasil pertanian. Hal ini bertujuan untuk mendukung kemandirian dan ketahanan pangan daerah, sekaligus meningkatkan nilai tambah produk-produk lokal.
5. Meningkatkan inklusi keuangan dan literasi keuangan di Aceh. Melalui KUR, Bank Aceh berupaya untuk menjangkau segmen masyarakat yang sebelumnya belum tersentuh oleh layanan keuangan formal. Hal ini diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat, khususnya yang berada di wilayah pedesaan atau pinggiran, dalam sistem keuangan yang lebih mapan.

Dalam mewujudkan tujuan dan misi penyaluran KUR, Bank Aceh menerapkan berbagai strategi dan inisiatif yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik UMKM di Aceh. Salah satu

strategi utama adalah melakukan pemetaan dan identifikasi sektor-sektor usaha yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan di Aceh. Berdasarkan hasil analisis, Bank Aceh kemudian menetapkan alokasi dan prioritas penyaluran KUR pada segmen-segmen usaha yang dianggap strategis, seperti pertanian, perikanan, perdagangan, dan industri pengolahan.

Bank Aceh juga berupaya untuk memperluas jejaring kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, asosiasi UMKM, dan lembaga pendamping lainnya. Melalui kolaborasi ini, Bank Aceh dapat memperoleh masukan dan umpan balik yang lebih komprehensif terkait kebutuhan dan tantangan yang dihadapi UMKM, sehingga dapat menyusun strategi penyaluran KUR yang lebih efektif dan berdampak. Dalam proses penyaluran KUR, Bank Aceh juga menerapkan pendekatan yang lebih fleksibel dan akomodatif dibandingkan dengan kredit komersial tradisional. Hal ini dilakukan dengan menyederhanakan persyaratan dan prosedur pengajuan, memberikan fasilitas restrukturisasi kredit, serta melakukan pendampingan dan pembinaan bagi debitur KUR. Strategi ini bertujuan untuk memastikan bahwa KUR dapat diakses dan dimanfaatkan secara optimal oleh UMKM di Aceh.

Bank Aceh berupaya untuk meningkatkan literasi keuangan dan pengetahuan UMKM terkait akses pembiayaan formal. Melalui program pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis, Bank Aceh membantu UMKM memahami prosedur pengajuan kredit,

mengelola keuangan usaha, dan meningkatkan kapasitas manajemen mereka. Hal ini diharapkan dapat mendorong partisipasi yang lebih luas dari UMKM dalam memanfaatkan layanan KUR yang disediakan oleh Bank Aceh.

Dalam pelaksanaannya, Bank Aceh juga senantiasa melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap kebijakan dan strategi penyaluran KUR. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa program KUR yang dijalankan tetap sejalan dengan kebutuhan dan dinamika UMKM di Aceh, serta dapat memberikan dampak yang optimal bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Secara keseluruhan, tujuan dan misi Bank Aceh dalam menyediakan KUR dapat dirangkum sebagai upaya untuk mendukung pemberdayaan UMKM, mendorong diversifikasi ekonomi, meningkatkan ketahanan ekonomi dan pangan, serta memperkuat inklusi keuangan di Aceh. Melalui penyaluran KUR yang tepat sasaran dan didukung oleh strategi yang komprehensif, Bank Aceh berharap dapat berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di daerah.

- b. Praktik Pengelolaan dan Pemantauan Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Bank Aceh

Sebagai salah satu bank penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Aceh, Bank Aceh menerapkan praktik pengelolaan dan pemantauan yang komprehensif terhadap debitur-debitur KUR. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa

penyaluran dan pengembalian kredit dapat berjalan dengan lancar, serta untuk meminimalisir risiko kredit yang mungkin timbul. Demikian juga dengan Bank Aceh Cabang Bireun.

Dalam pengelolaan KUR, Bank Aceh membagi proses ini menjadi beberapa tahapan. Pertama, setelah pencairan kredit, pihak Bank Aceh akan melakukan pemantauan dan pembinaan secara rutin terhadap debitur. Pemantauan ini dilakukan melalui kunjungan lapangan oleh account officer ke lokasi usaha debitur, untuk melihat perkembangan usaha serta memastikan bahwa dana kredit digunakan sesuai dengan tujuan. Selain itu, Bank Aceh juga melakukan pemantauan terhadap pembayaran angsuran oleh debitur. Jika terdapat debitur yang mengalami keterlambatan pembayaran, maka pihak Bank Aceh akan segera melakukan tindakan penanganannya. Tindakan tersebut dapat berupa pemberian surat peringatan, kunjungan lapangan untuk mengetahui penyebab keterlambatan, hingga melakukan restrukturisasi kredit jika diperlukan.

Dalam proses restrukturisasi kredit, Bank Aceh akan melakukan analisis mendalam terhadap kondisi usaha debitur, penyebab keterlambatan pembayaran, serta prospek usaha debitur di masa depan. Berdasarkan hasil analisis ini, pihak Bank Aceh akan menentukan skema restrukturisasi yang paling sesuai, seperti perpanjangan jangka waktu kredit, penurunan suku bunga, atau pengurangan jumlah angsuran. Bank Aceh juga melakukan pemantauan terhadap agunan yang dijamin oleh debitur. Pihak

bank akan melakukan pemeriksaan secara berkala untuk memastikan bahwa agunan tersebut masih memenuhi syarat dan nilainya tetap terjaga. Jika terjadi penurunan nilai agunan, maka debitur diwajibkan untuk menambah atau mengganti agunan yang bersangkutan.

Untuk memperkuat pengelolaan KUR, Bank Aceh juga menerapkan sistem manajemen risiko yang komprehensif. Hal ini meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko-risiko yang mungkin timbul, seperti risiko kredit, risiko operasional, dan risiko reputasi. Sistem manajemen risiko ini diintegrasikan ke dalam seluruh proses bisnis Bank Aceh, termasuk dalam penyaluran dan pengelolaan KUR. Bank Aceh juga terus melakukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam pengelolaan KUR. Hal ini dilakukan melalui pelatihan-pelatihan, workshop, dan program pengembangan kompetensi lainnya, agar SDM tersebut memiliki pemahaman yang memadai terkait karakteristik KUR, peraturan yang berlaku, serta teknik-teknik pengelolaan dan pemantauan kredit yang efektif.

4.2.2 Implementasi Pemberian KUR Terhadap Usaha Mikro Dalam mengurangi Tingkat kemiskinan di Kabupaten Bireun

KUR merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan

pengurangan kemiskinan. Studi ini menggali pengalaman para pelaku usaha mikro yang menerima KUR, mulai dari bagaimana mereka memperoleh informasi tentang program ini, proses pengajuan, penilaian terhadap tingkat bunga dan persyaratan, serta strategi dalam mengelola kewajiban pembayaran angsuran. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini berusaha memahami secara mendalam implementasi KUR di tingkat akar rumput, sehingga dapat memberikan masukan berharga bagi upaya peningkatan efektivitas dan aksesibilitas program di masa depan. Berikut adalah beberapa pertanyaan terkait dengan Implementasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada sektor usaha mikro di Kabupaten Bireun untuk memahami proses dan mekanisme pelaksanaannya.

a. Informasi KUR

Informasi mengenai program KUR banyak didapatkan oleh para pemilik usaha mikro dan kecil melalui berbagai saluran. Banyak dari mereka mengetahui KUR dari tetangga atau rekan sesama pengusaha yang telah lebih dulu mengajukan dan memperoleh kredit ini. Penyuluhan dan sosialisasi program KUR yang dilakukan oleh pihak bank dan pemerintah setempat juga menjadi sumber informasi penting bagi banyak pengusaha. Selain itu, promosi dan penawaran langsung dari pihak bank saat pengusaha mengajukan pinjaman juga turut memperkenalkan program KUR ini. Informasi melalui brosur, pamflet, maupun media sosial juga membantu menyebarkan pengetahuan mengenai

persyaratan, bunga, dan manfaat dari program kredit bersubsidi pemerintah ini bagi pengembangan usaha kecil dan menengah.

Berikut adalah beberapa jawaban dari informan tentang bagaimana menemukan informasi tentang KUR dan apa yang membuat Anda tertarik untuk mengajukannya

“Saya mengetahui KUR dari tetangga yang juga memiliki usaha mikro dan menceritakan program kredit dengan bunga rendah ini.

Berdasarkan jawaban diatas diketahui bahwa Informasi mengenai Kredit Usaha Rakyat (KUR) diperoleh dari jaringan sosial dan komunikasi dengan sesama pelaku usaha mikro, dalam hal ini tetangga yang juga memiliki usaha serupa. Berbagi pengalaman dan pengetahuan di antara pelaku usaha mikro terbukti menjadi sumber informasi yang penting, terutama terkait dengan program-program pembiayaan dan fasilitas yang tersedia untuk mendukung usaha kecil, seperti KUR dengan margin rendah. Informasi dari sumber yang relevan dan dapat dipercaya, yaitu sesama pelaku usaha mikro, membantu memberikan pemahaman awal mengenai karakteristik dan manfaat program KUR. Hal ini menjadi pertimbangan penting bagi pengambilan keputusan untuk mengajukan kredit melalui program tersebut dalam rangka mendukung pengembangan usaha mikro.

Informan lain menyebutkan bahwa :

“Informasi tentang KUR saya dapatkan dari penyuluhan yang diadakan di desa kami oleh pihak bank”

Penyataan diatas menjelaskan bahwa informasi mengenai Kredit Usaha Rakyat (KUR) diperoleh melalui kegiatan

penyuluhan yang diadakan oleh pihak bank di desa-desa. Dalam kegiatan tersebut, perwakilan bank menyampaikan pemahaman awal mengenai karakteristik dan manfaat program kredit dengan bunga rendah ini. Penyampaian informasi secara langsung dari sumber resmi, yaitu bank, dinilai sangat bermanfaat bagi pelaku usaha mikro. Umumnya, usaha mikro memiliki keterbatasan modal dan kesulitan dalam mengakses kredit perbankan. Oleh karena itu, informasi yang jelas dan terpercaya dari bank mengenai KUR dapat menambah keyakinan bagi pelaku usaha mikro untuk mengajukan kredit melalui program tersebut guna mendukung pengembangan usahanya. Secara keseluruhan, kegiatan penyuluhan yang diinisiasi oleh pihak bank menjadi saluran informasi yang penting bagi pemahaman dan pertimbangan pelaku usaha mikro dalam mengakses program KUR sebagai solusi pembiayaan bagi usaha mereka.

Selain itu ada juga yang memperoleh informasi tentang KUR dari teman bisnis, seperti pernyataan informan berikut :
“Teman bisnis saya mengajak saya untuk mengajukan KUR karena persyaratannya terjangkau bagi usaha kecil”

Berdasarkan jawaban diatas dapat diketahui bahwa Informan memperoleh informasi mengenai persyaratan KUR yang lebih terjangkau bagi usaha kecil melalui jaringan pertemanan dan sesama pelaku usaha. Teman bisnis yang telah memahami karakteristik KUR menyarankan informan untuk mengajukan KUR karena sesuai dengan kondisi usaha kecilnya. Adanya rekomendasi

dari teman bisnis yang telah berpengalaman dengan KUR menjadi faktor penting dalam mempertimbangkan untuk mengajukan KUR. Selain itu masalah bunga juga diperhitungkan untuk pengajuan KUR berikut adalah jawaban dari salah satu pemilik Usaha:

“Saya tertarik karena margin dalam KUR hanya 6% per tahun, jauh lebih rendah daripada opsi kredit lain”

Berdasarkan pernyataan diatas diketahui bahwa pelaku usaha memahami bahwa margin KUR sebesar 6% per tahun jauh lebih rendah dibandingkan opsi kredit lain. Informasi mengenai margin KUR yang kompetitif menjadi daya tarik bagi pelaku usaha dalam mempertimbangkan untuk mengajukan KUR. Beban margin yang lebih rendah dibandingkan opsi kredit lain dipandang dapat mendukung pengembangan usaha dengan lebih terjangkau.

Sejalan dengan pernyataan diatas maka beberapa informan menyatakan bahwa KUR jadi pilihan yang menarik karena margin yang rendah. Rendahnya margin KUR merupakan salah satu daya tarik utama bagi para pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan akses pembiayaan. Dengan beban margin yang lebih ringan, para pengusaha kecil dapat lebih leluasa mengalokasikan modal kerjanya untuk kegiatan operasional dan pengembangan usahanya. Selain itu, persyaratan pengajuan KUR yang relatif lebih sederhana juga menjadi pertimbangan bagi para pelaku usaha. Keterbatasan agunan dan dokumen formal yang diperlukan dalam proses pengajuan KUR dinilai lebih akomodatif bagi pengusaha

kecil dibandingkan dengan persyaratan kredit komersial pada umumnya.

Kemudahan akses dan struktur biaya yang lebih terjangkau ini menjadikan program KUR semakin menarik minat para pelaku usaha kecil dan menengah yang sebelumnya terkendala dalam memperoleh pendanaan dari lembaga keuangan formal. Hal ini sejalan dengan tujuan utama KUR untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan UMKM di Indonesia.

Beberapa informan menyebutkan bahwa informasi diperoleh dari bank, berikut hasil wawancara dengan informan

“Bank tempat saya meminjam menginformasikan program KUR saat saya datang mengajukan kredit untuk modal usaha”

Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa Informasi mengenai KUR yang disampaikan oleh pihak bank dapat menjadi alternatif yang menarik bagi pelaku usaha kecil. Program KUR sendiri memiliki persyaratan dan skema kredit yang lebih terjangkau dibandingkan dengan opsi kredit komersial lainnya, seperti suku bunga yang lebih rendah. Dengan informasi yang diberikan oleh pihak bank, nasabah dapat mempertimbangkan apakah KUR sesuai dengan kebutuhan dan kondisi usahanya saat ini. Proaktifnya bank dalam menginformasikan program KUR saat nasabah mengajukan kredit juga mengindikasikan adanya sinergi yang baik antara pihak perbankan dan pemerintah dalam menyalurkan pendanaan kepada usaha kecil dan menengah. Hal ini dapat mendorong peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha

kecil yang seringkali terkendala dengan persyaratan kredit komersial yang lebih ketat.

b. Proses Pengajuan KUR

Dalam penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa proses pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan skema kredit komersial pada umumnya. Secara umum, proses pengajuan KUR dirancang untuk dapat lebih mudah diakses dan lebih akomodatif bagi para pelaku usaha kecil dan menengah. Beberapa jawaban dari informan terkait dengan proses pengajuan KUR adalah sebagai berikut :

Beberapa informan menyebutkan bahwa proses pengajuan KUR yang dirasakan oleh para pelaku usaha cukup sederhana dan akomodatif. Sebagian besar informan menyatakan bahwa persyaratan administrasi untuk mengajukan KUR jauh lebih mudah dibandingkan dengan mengajukan kredit komersial pada umumnya. Mereka hanya perlu melengkapi dokumen dasar seperti KTP, NPWP, dan laporan keuangan usaha, tanpa harus membuat proposal bisnis yang rinci. Bank juga membantu melengkapi dokumen yang masih kurang, serta memberikan penjelasan yang rinci terkait skema, syarat, dan proses KUR agar para pelaku usaha benar-benar memahami.

Berdasarkan jawaban diatas maka diketahui bahwa proses pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dirasakan cukup sederhana

dan akomodatif oleh para pelaku usaha. Sebagian besar informan menyatakan bahwa persyaratan administrasi untuk mengajukan KUR jauh lebih mudah dibandingkan dengan mengajukan kredit komersial pada umumnya. Untuk mengajukan KUR, para pelaku usaha hanya perlu melengkapi dokumen dasar seperti KTP, NPWP, dan laporan keuangan usaha. Mereka tidak harus membuat proposal bisnis yang rinci dan komprehensif, yang seringkali menjadi tantangan tersendiri bagi usaha kecil dan menengah. Kemudahan proses pengajuan ini tentu sangat membantu para pelaku usaha, khususnya yang belum memiliki pengalaman mengajukan kredit sebelumnya. Selain itu, pihak bank juga proaktif dalam membantu para pemohon KUR. Bank akan melengkapi dokumen-dokumen yang masih kurang, serta memberikan penjelasan yang rinci terkait skema, syarat, dan proses KUR secara keseluruhan. Hal ini bertujuan agar para pelaku usaha benar-benar memahami dan dapat memenuhi seluruh persyaratan yang dibutuhkan. Pendekatan informatif dan suportif dari pihak bank ini turut mendorong kemudahan dalam proses pengajuan KUR

Selanjutnya beberapa informan lain menyebutkan bahwa proses verifikasi dan analisis kelayakan usaha oleh pihak bank berjalan cepat, hanya membutuhkan waktu sekitar 1 minggu sejak berkas dilengkapi. Yang mengejutkan bagi beberapa informan adalah bank tidak meminta agunan yang besar, cukup dengan jaminan sertifikat tanah atau BPKB kendaraan. Hal ini tentu sangat memudahkan akses pendanaan bagi usaha kecil dan menengah.

Proses pencairan dana KUR juga terbilang cepat, yaitu kurang dari 2 minggu setelah pengajuan disetujui.

Berdasarkan data yang diperoleh, proses pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dirasakan cukup sederhana dan akomodatif oleh para pelaku usaha. Sebagian besar informan menyatakan bahwa persyaratan administratif untuk mengajukan KUR jauh lebih mudah dibandingkan dengan mengajukan kredit komersial pada umumnya. Dalam mengajukan KUR, para pelaku usaha hanya perlu melengkapi dokumen dasar seperti KTP, NPWP, dan laporan keuangan usaha, tanpa harus membuat proposal bisnis yang rinci. Hal ini tentu sangat membantu para pengusaha, terutama yang belum memiliki pengalaman mengajukan kredit sebelumnya. Pihak bank juga proaktif dalam melengkapi dokumen yang masih kurang serta memberikan penjelasan yang rinci terkait skema, syarat, dan proses KUR secara keseluruhan. Pendekatan informatif dan suportif dari bank ini berkontribusi pada kemudahan proses pengajuan KUR.

Selanjutnya, beberapa informan menyebutkan bahwa proses verifikasi dan analisis kelayakan usaha oleh bank berjalan cepat, hanya membutuhkan waktu sekitar 1 minggu sejak berkas dilengkapi. Yang cukup mengejutkan bagi beberapa informan adalah, bank tidak meminta agunan yang besar, cukup dengan jaminan sertifikat tanah atau BPKB kendaraan. Hal ini tentu sangat memudahkan akses pendanaan bagi usaha kecil dan menengah.

Proses pencairan dana KUR juga terbilang cepat, yaitu kurang dari 2 minggu setelah pengajuan disetujui.

Dari pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa proses pengajuan KUR dinilai cukup sederhana dan akomodatif oleh para pelaku usaha. Mulai dari persyaratan administratif yang tidak rumit, proses verifikasi dan analisis yang cepat, serta persyaratan agunan yang tidak memberatkan, KUR hadir sebagai solusi pembiayaan yang sangat mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah.

Beberapa informan lainnya menyebutkan bahwa Bank dinilai sangat kooperatif dan berusaha memudahkan proses pengajuan KUR. Staf bank yang menangani KUR juga ramah, informatif, serta berusaha membantu para pelaku usaha dalam memahami perjanjian kredit. Beberapa informan juga menyebut bank menawarkan program pendampingan usaha, pelatihan manajemen, serta asuransi usaha bagi penerima KUR. Hal ini menunjukkan adanya upaya bank untuk tidak hanya menyalurkan kredit, namun juga membantu mengembangkan kapabilitas manajerial dan menjamin kelangsungan usaha para debitur.

Berdasarkan informasi tersebut maka dapat dijelaskan bahwa Bank dinilai sangat kooperatif dan berusaha memudahkan proses pengajuan KUR bagi para pelaku usaha. Staf bank yang menangani KUR dinilai ramah, informatif, serta berusaha membantu para nasabah dalam memahami segala aspek perjanjian kredit. Beberapa informan juga menyebut bahwa pihak bank

menawarkan program pendampingan usaha, pelatihan manajemen, serta asuransi usaha bagi penerima KUR. Upaya bank untuk tidak hanya menyalurkan kredit, namun juga membantu mengembangkan kapabilitas manajerial dan menjamin kelangsungan usaha para debitur, menunjukkan adanya komitmen yang tinggi dari bank untuk memberdayakan usaha kecil dan menengah. Pendekatan yang komprehensif ini, mulai dari kemudahan akses kredit hingga program pengembangan kapasitas usaha, menunjukkan bahwa bank tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian target penyaluran kredit, melainkan juga turut berkontribusi pada keberlanjutan dan peningkatan daya saing usaha-usaha yang didanai melalui KUR.

Sikap kooperatif, keramahan staf, serta program-program pendukung yang ditawarkan bank, telah menciptakan persepsi positif di kalangan para pelaku usaha mengenai KUR. Hal ini tentunya akan mendorong minat dan kepercayaan masyarakat terhadap produk kredit mikro yang diinisiasi pemerintah tersebut, sehingga tujuan utama KUR untuk meningkatkan akses permodalan bagi UMKM dapat semakin terwujud.

c. Tingkat Bunga atau Margin dan Persyaratan KUR

Hasil penelitian saya menunjukkan bahwa secara umum, pengusaha kecil yang menerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) menilai tingkat margin dan persyaratan kredit yang ditetapkan cukup terjangkau dan mendukung pengembangan usaha mereka. Meskipun ada sebagian yang merasa tingkat margin sedikit lebih

tinggi dari yang diharapkan, namun masih dapat ditanggung karena manfaat yang mereka peroleh dari KUR. Selain itu, kemudahan prosedur pengajuan dan kelonggaran persyaratan agunan dalam KUR juga sangat diapresiasi oleh para pengusaha kecil, karena membantu mereka yang memiliki aset terbatas. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KUR telah memberikan dampak positif bagi pengembangan usaha kecil di Indonesia. Berikut adalah beberapa alternatif jawaban dari informan.

Beberapa informan menyatakan bahwa tingkat bunga KUR cukup terjangkau dan persyaratan tidak memberatkan. Berikut adalah jawaban dari informan:

“Saya merasa tingkat margin KUR yang saya terima cukup terjangkau dan sesuai dengan kemampuan usaha saya. Persyaratannya juga tidak memberatkan”.

“Saya menilai tingkat margin KUR cukup kompetitif jika dibandingkan dengan sumber pendanaan lain yang tersedia bagi usaha kecil seperti saya”

“Saya merasa bahwa tingkat suku margin KUR cukup wajar dan dapat saya tanggung, mengingat manfaat yang saya peroleh dari kredit ini”

“Secara keseluruhan, saya menilai bahwa tingkat margin dan persyaratan KUR yang saya terima sangat mendukung pengembangan usaha kecil saya”

“Saya merasa bahwa tingkat margin KUR yang ditetapkan bank cukup wajar dan sebanding dengan manfaat yang saya peroleh dari kredit ini”

“Secara keseluruhan, saya merasa puas dengan tingkat margin dan persyaratan lainnya dari KUR yang saya terima, karena sangat sesuai dengan kebutuhan usaha kecil saya”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat dijelaskan bahwapelaku usaha memulai dan mengembangkan usaha kecil memang tidak mudah, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan modal dan akses pembiayaan. Namun, dengan adanya program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diinisiasi oleh pemerintah, banyak pengusaha kecil dapat memperoleh dukungan pembiayaan yang dibutuhkan untuk menjalankan dan memperluas bisnisnya. Berdasarkan pengamatan, tingkat bunga KUR yang diterima oleh para pengusaha kecil cukup terjangkau dan sesuai dengan kemampuan usaha mereka. Persyaratannya pun tidak memberatkan, sehingga menjadi faktor penting yang mendorong pengusaha kecil untuk mengajukan dan memanfaatkan KUR sebagai sumber pembiayaan.

Selain itu, tingkat bunga KUR juga dinilai cukup kompetitif jika dibandingkan dengan sumber pendanaan lain yang tersedia bagi usaha kecil. Para pengusaha kecil merasa bahwa tingkat suku bunga KUR cukup wajar dan dapat mereka tanggung, mengingat manfaat yang mereka peroleh dari kredit ini. Secara keseluruhan, para pengusaha kecil merasa puas dengan tingkat margin dan persyaratan lainnya dari KUR yang mereka terima, karena sangat sesuai dengan kebutuhan usaha kecil mereka. Hal ini menunjukkan bahwa program KUR telah berhasil menyediakan solusi pembiayaan yang tepat bagi pengembangan usaha-usaha skala mikro dan kecil. Ketersediaan KUR dengan tingkat margin dan

persyaratan yang terjangkau bagi pengusaha kecil sangat penting dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha-usaha tersebut. Hal ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kinerja dan daya saing usaha kecil itu sendiri, tetapi juga pada peningkatan kontribusi sektor UMKM terhadap perekonomian nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, upaya pemerintah dan lembaga terkait untuk terus memperkuat dan memperluas akses pembiayaan bagi UMKM melalui program KUR sangat dibutuhkan dalam mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Selain itu terdapat beberapa informan yang menyebutkan bahwa tingkat margin KUR sedikit lebih tinggi namun masih terjangkau. Berikut adalah hasil wawancara selengkapnya

“Tingkat margin KUR sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan kredit bank lainnya, namun masih dapat saya tanggung mengingat manfaat yang saya peroleh dari program ini”

“Meskipun tingkat margin KUR sedikit lebih tinggi dari yang saya harapkan, namun secara keseluruhan persyaratan yang ditetapkan masih dapat saya penuhi dengan baik”

“Meskipun tingkat margin KUR sedikit lebih tinggi dari perkiraan saya, namun masih terjangkau dan sebanding dengan manfaat yang saya terima”

“Tingkat margin KUR masih kompetitif jika dibandingkan dengan opsi pendanaan lain yang tersedia bagi usaha kecil seperti saya”

“Meskipun sedikit lebih tinggi dari margin bank umum, tingkat margin KUR masih dapat saya tanggung mengingat kemudahan prosedur yang diberikan”

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dilihat bahwa sebagian besar informan memiliki strategi pengelolaan keuangan dan

anggaran untuk memastikan pembayaran angsuran tepat waktu. Mereka membuat anggaran bulanan, menyisihkan dana khusus, serta menyesuaikan gaya hidup dan pengeluaran agar tetap di bawah anggaran. Selain itu, mereka juga memastikan memiliki dana cadangan yang cukup untuk mengantisipasi masalah keuangan. Informan lainnya lebih focus pada pengaturan pembayaran angsuran secara otomatis dan penjadwalan. Mereka mengatur pembayaran secara otomatis dari rekening bank, mencatat tanggal jatuh tempo, dan membuat daftar seluruh kewajiban angsuran. Mereka juga mengatur pembayaran pada tanggal yang sesuai dengan arus kas masuk serta melakukan penyesuaian jika terjadi perubahan.

Selain itu, beberapa informan juga menerapkan komunikasi yang baik dengan pihak pemberi pinjaman dan disiplin dalam pembayaran angsuran. Mereka segera menghubungi pihak pemberi pinjaman jika ada kekurangan dana, selalu membayar lebih dari jumlah minimal, dan memanfaatkan fitur pengingat pembayaran. Mereka juga menyimpan bukti pembayaran angsuran sebagai dokumentasi. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa informan memiliki berbagai strategi untuk memastikan pembayaran angsuran tepat waktu, mulai dari pengelolaan keuangan, pengaturan pembayaran, hingga komunikasi dengan pihak pemberi pinjaman.

Selanjutnya beberapa informan lain menyebutkan bahwa adanya kemudahan prosedur dan persyaratan agunan. Berikut adalah hasil wawancara selengkapnya:

"Bank hanya meminta jaminan sesuai dengan plafon kredit yang saya ajukan, dan proses pengajuan KUR lebih sederhana dibandingkan kredit komersial. Meskipun margin sedikit lebih tinggi, kemudahan prosedur dan kelonggaran persyaratan agunan sangat membantu usaha saya. Persyaratan seperti jangka waktu dan skema angsuran juga akomodatif, dan prosesnya cepat tanpa banyak birokrasi, membuatnya sangat memudahkan saya sebagai pengusaha kecil."

Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) tampaknya memiliki beberapa keunggulan dan kemudahan yang sangat membantu para pengusaha kecil. Pertama, bank hanya meminta jaminan yang sesuai dengan plafon kredit yang diajukan, sehingga tidak memberatkan pengusaha. Kedua, proses dan persyaratan administrasi pengajuan KUR lebih sederhana dibandingkan dengan kredit komersial pada umumnya, sangat memudahkan pengusaha kecil dalam mengajukan kredit. Meskipun tingkat bunganya sedikit lebih tinggi, namun kemudahan prosedur dan kelonggaran persyaratan agunan dari KUR sangat membantu usaha mereka.

Selain itu, persyaratan lain seperti jangka waktu, grace period, dan skema angsuran dalam KUR juga sangat akomodatif terhadap kebutuhan usaha kecil. Bank pun cukup fleksibel dalam menentukan persyaratan KUR, sehingga dapat menyesuaikan dengan kondisi usaha masing-masing pengusaha kecil. Persyaratan agunan yang tidak memberatkan dalam KUR juga sangat membantu pengusaha kecil yang masih memiliki aset terbatas.

Selain itu, skema angsuran KUR yang dapat disesuaikan dengan arus kas usaha juga sangat membantu.

Persyaratan KUR cukup akomodatif bagi usaha para pengusaha kecil. Proses pengajuan KUR yang cepat dan persyaratan yang tidak berbelit-belit juga sangat memudahkan mereka sebagai pengusaha kecil. Dapat disimpulkan bahwa program KUR memberikan banyak kemudahan dan akomodasi bagi pengusaha kecil dalam mengakses pembiayaan, sehingga sangat membantu pengembangan usaha mereka

d. Kewajiban Pembayaran

Beberapa informan menjawab bahwa untuk melakukan kewajiban pembayaran angsuran maka diperlukan strategi pengelolaan keuangan dan anggaran, pembayaran otomatis dan pengaturan jadwal serta komunikasi dengan pemberi pinjaman serta disiplin pembayaran.

Dalam mengelola keuangan dan anggaran usaha, para penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) perlu menerapkan beberapa strategi penting agar dapat memanfaatkan kredit dengan efektif dan disiplin dalam pembayaran angsuran. Berikut adalah beberapa strategi pengelolaan keuangan dan anggaran yang dapat diterapkan:

1. Pertama, membuat anggaran usaha yang realistis dan terkontrol. Sebagai penerima KUR, pengusaha kecil perlu membuat anggaran usaha yang mencakup segala pengeluaran dan pemasukan. Anggaran ini harus disusun dengan cermat dan realistis sesuai dengan kapasitas usaha. Hal ini akan

membantu pengusaha memonitor arus kas, mengidentifikasi kebutuhan pembiayaan, dan mengalokasikan dana secara tepat. Anggaran yang terkontrol juga akan mencegah pengeluaran yang berlebihan dan memastikan dana cukup tersedia untuk membayar angsuran KUR secara tepat waktu.

2. Kedua, memisahkan keuangan usaha dan pribadi. Penting bagi pengusaha kecil untuk memisahkan dengan tegas antara keuangan usaha dan keuangan pribadi/keluarga. Pencampuran kedua jenis keuangan ini dapat menyebabkan kesulitan dalam memonitor arus kas, mengalokasikan dana, dan memenuhi kewajiban pembayaran angsuran KUR. Pemisahan yang jelas antara keuangan usaha dan pribadi akan membuat pengelolaan keuangan menjadi lebih tertib, transparan, dan terkontrol.
3. Ketiga, membangun sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang baik. Pengusaha kecil perlu memiliki sistem pembukuan yang rapi dan tertib untuk mencatat segala transaksi keuangan usaha. Pencatatan yang akurat dan teratur akan memudahkan pengusaha dalam memonitor arus kas, mengidentifikasi tren penjualan/pengeluaran, serta menyiapkan laporan keuangan yang diperlukan, termasuk untuk keperluan pembayaran angsuran KUR. Sistem pencatatan yang baik juga akan membantu pengusaha dalam pengambilan keputusan strategis bagi usahanya.

4. Keempat, mengalokasikan dana secara prioritas dan efisien. Setelah menyusun anggaran usaha yang realistis, pengusaha kecil perlu mengalokasikan dananya secara prioritas dan efisien. Dana harus dialokasikan terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban pembayaran angsuran KUR, sebelum dialokasikan untuk keperluan operasional dan pengembangan usaha lainnya. Alokasi dana yang tepat sasaran dan proporsional akan memastikan kewajiban pembayaran angsuran KUR tetap terpenuhi.
5. Kelima, menerapkan disiplin pembayaran angsuran. Salah satu kunci keberhasilan dalam memanfaatkan kredit KUR adalah konsistensi dan disiplin dalam membayar angsuran. Pengusaha kecil perlu menjadwalkan pembayaran angsuran sebagai prioritas utama dan memastikan dana selalu tersedia pada saat jatuh tempo. Keterlambatan atau ketidakmampuan membayar angsuran dapat berakibat buruk, seperti denda, penurunan skor kredit, bahkan pemblokiran kredit di masa mendatang.
6. Keenam, memanfaatkan fasilitas pembayaran angsuran otomatis. Banyak lembaga keuangan penyalur KUR menawarkan fasilitas pembayaran angsuran secara otomatis melalui pendebitan rekening. Fitur ini sangat membantu pengusaha kecil agar selalu disiplin dalam membayar angsuran tepat waktu tanpa khawatir lupa atau terlambat.

Pengusaha hanya perlu memastikan saldo rekening mencukupi saat jatuh tempo pembayaran.

7. Ketujuh, membina komunikasi yang baik dengan pemberi pinjaman. Pengusaha kecil penerima KUR perlu menjalin komunikasi yang baik dan proaktif dengan pihak pemberi pinjaman, terutama jika menghadapi kendala dalam membayar angsuran. Keterbukaan dan komunikasi yang baik akan membantu pihak pemberi pinjaman memahami situasi yang dihadapi debitur dan memungkinkan adanya restrukturisasi atau keringanan pembayaran jika diperlukan. Komunikasi yang baik juga akan membangun kepercayaan dan meningkatkan peluang pengajuan kredit di masa mendatang.

Dengan menerapkan strategi pengelolaan keuangan dan anggaran yang baik, didukung dengan disiplin pembayaran angsuran dan komunikasi yang efektif dengan pemberi pinjaman, para penerima KUR dapat memanfaatkan kredit tersebut secara optimal untuk mengembangkan usahanya. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi peningkatan kinerja dan keberlanjutan usaha kecil di Indonesia.

Salah satu strategi penting dalam mengelola kredit KUR adalah memanfaatkan fasilitas pembayaran angsuran secara otomatis. Banyak lembaga keuangan penyalur KUR menyediakan opsi pembayaran angsuran secara otomatis melalui pendebitan rekening debitur. Fitur ini sangat membantu pengusaha kecil agar

selalu disiplin dalam membayar angsuran tepat waktu tanpa khawatir lupa atau terlambat.

Dengan pembayaran angsuran otomatis, pengusaha kecil cukup memastikan saldo rekening mencukupi pada saat jatuh tempo pembayaran. Lembaga keuangan akan secara otomatis mendebit rekening untuk membayar angsuran sesuai jadwal yang telah disepakati. Hal ini akan menjamin pembayaran angsuran selalu tepat waktu dan menghindari risiko keterlambatan. Selain itu, pengusaha kecil juga perlu mengatur jadwal pembayaran angsuran KUR dengan baik. Penting untuk menjadwalkan pembayaran angsuran sebagai prioritas utama dan memastikan dana selalu tersedia pada saat jatuh tempo. Pengusaha dapat menyesuaikan jadwal pembayaran dengan arus kas usahanya agar tidak terjadi kekurangan dana saat jatuh tempo. Misalnya, jika arus kas usaha paling lancar pada minggu pertama setiap bulan, maka pengusaha dapat menjadwalkan pembayaran angsuran pada minggu tersebut. Dengan demikian, pengusaha akan memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan dana pembayaran dan memastikan angsuran selalu terbayar tepat waktu. Pengaturan jadwal pembayaran angsuran yang disesuaikan dengan arus kas usaha juga akan membantu pengusaha mengelola keuangan secara lebih efektif. Pengusaha tidak perlu khawatir kekurangan dana untuk operasional usaha karena dana telah dialokasikan untuk pembayaran angsuran. Hal ini akan mencegah terjadinya tunggakan angsuran dan menjaga reputasi kredit pengusaha di mata lembaga keuangan.

Selain disiplin dalam pembayaran angsuran, pengusaha kecil penerima KUR juga perlu menjalin komunikasi yang baik dan proaktif dengan pihak pemberi pinjaman, yaitu lembaga keuangan penyalur KUR. Komunikasi yang baik dengan pemberi pinjaman sangat penting terutama jika pengusaha menghadapi kendala atau kesulitan dalam membayar angsuran KUR. Keterbukaan dan komunikasi yang baik akan membantu pihak pemberi pinjaman memahami situasi yang dihadapi debitur dan memungkinkan adanya restrukturisasi atau keringanan pembayaran jika diperlukan. Misalnya, jika pengusaha mengalami penurunan omzet usaha yang menyebabkan kesulitan membayar angsuran, pengusaha dapat segera menghubungi pihak lembaga keuangan untuk menjelaskan situasi yang dihadapi. Dengan komunikasi yang baik, lembaga keuangan mungkin bersedia mempertimbangkan restrukturisasi skema pembayaran angsuran agar lebih sesuai dengan kondisi usaha saat itu.

Komunikasi yang baik juga akan membangun kepercayaan antara pengusaha dan lembaga keuangan. Hal ini dapat meningkatkan peluang pengusaha dalam mengajukan kredit di masa mendatang, baik KUR maupun fasilitas kredit lainnya. Lembaga keuangan tentunya akan lebih percaya untuk memberikan pinjaman kepada pengusaha yang terbukti disiplin dan bertanggung jawab dalam memenuhi kewajibannya. Selain itu, pengusaha juga perlu proaktif menginformasikan perkembangan usahanya kepada lembaga keuangan. Misalnya, jika usaha tengah mengalami

peningkatan omzet atau perluasan pasar, pengusaha dapat memberitahukan hal tersebut kepada pihak lembaga keuangan. Informasi ini dapat membantu lembaga keuangan dalam mempertimbangkan peningkatan plafon kredit atau fasilitas pembiayaan lainnya di masa mendatang.

Dengan komunikasi yang baik dan proaktif, pengusaha kecil penerima KUR dapat membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan lembaga keuangan. Hal ini tidak hanya akan membantu pengusaha dalam mengelola kredit KUR secara efektif, namun juga dapat membuka peluang pembiayaan yang lebih luas di masa depan.

Disiplin dalam membayar angsuran merupakan salah satu kunci keberhasilan pengusaha kecil dalam memanfaatkan kredit KUR. Keterlambatan atau ketidakmampuan membayar angsuran dapat berakibat buruk, seperti denda, penurunan skor kredit, bahkan pemblokiran kredit di masa mendatang. Oleh karena itu, pengusaha kecil perlu menjadwalkan pembayaran angsuran KUR sebagai prioritas utama dan memastikan dana selalu tersedia pada saat jatuh tempo. Ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas pembayaran angsuran otomatis melalui pendebitan rekening. Selain itu, pengusaha juga perlu mengatur jadwal pembayaran angsuran yang selaras dengan arus kas usahanya. Misalnya, dengan menjadwalkan pembayaran angsuran pada minggu pertama setiap bulan saat arus kas usaha paling lancar. Hal

ini akan memastikan pengusaha selalu memiliki dana yang cukup untuk membayar angsuran tepat waktu.

Disiplin pembayaran angsuran juga dapat ditunjukkan dengan membuat catatan pembayaran yang rapi dan teratur. Pengusaha sebaiknya memiliki buku catatan atau dokumen digital yang mencatat setiap pembayaran angsuran yang telah dilakukan. Catatan ini bukan hanya berguna untuk arsip pribadi, namun juga dapat digunakan sebagai bukti pembayaran jika diperlukan oleh pihak lembaga keuangan. Pemilik usaha juga perlu memastikan tidak ada tunggakan pembayaran angsuran. Jika terpaksa mengalami keterlambatan, segera hubungi pihak lembaga keuangan untuk berkoordinasi dan mencari solusi terbaik. Komunikasi yang terbuka dan proaktif akan membantu mencegah dampak buruk yang lebih lanjut.

Dengan menerapkan disiplin pembayaran angsuran yang konsisten, pengusaha kecil penerima KUR dapat menjaga reputasi kreditnya dengan baik di mata lembaga keuangan. Hal ini tidak hanya akan memperlancar proses pembayaran KUR saat ini, namun juga dapat membuka peluang pengajuan kredit atau fasilitas pembiayaan lain di masa mendatang. Penerapan strategi pengelolaan keuangan dan anggaran yang baik, didukung dengan disiplin pembayaran angsuran dan komunikasi yang efektif dengan pemberi pinjaman, para penerima KUR dapat memanfaatkan kredit tersebut secara optimal untuk mengembangkan usahanya. Hal ini

akan memberikan dampak positif bagi peningkatan kinerja dan keberlanjutan usaha kecil di Indonesia.

4.3 Pembahasan

Secara keseluruhan, dampak KUR di Kabupaten Bireun terbukti memberikan dampak positif terhadap pengurangan tingkat kemiskinan dengan meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro. Namun untuk meningkatkan efektivitas program ini perlu adanya peningkatan dalam sosialisasi dan pelatihan bagi pelaku usaha. Penelitian lebih lanjut juga disarankan untuk mengevaluasi dampak jangka panjang dari KUR terhadap pertumbuhan usaha dan pengurangan kemiskinan. Dengan pendekatan yang sistematis dan dukungan berkelanjutan, KUR memiliki potensi signifikan untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) memiliki potensi signifikan dalam mengurangi kemiskinan, terutama di daerah seperti Kabupaten Bireun, melalui beberapa mekanisme. KUR menyediakan akses pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau bagi usaha mikro dan kecil yang sering kali menghadapi kendala dalam mendapatkan modal dari lembaga keuangan formal. Dengan suku bunga yang relatif rendah dan persyaratan yang tidak memberatkan, KUR memungkinkan pelaku usaha untuk mendapatkan dana yang diperlukan untuk memulai atau mengembangkan bisnis mereka. Akses terhadap modal ini sangat penting, karena banyak usaha kecil yang bergantung pada pinjaman

untuk membeli bahan baku, memperluas produksi, atau meningkatkan infrastruktur usaha. Selanjutnya program KUR mendorong peningkatan produktivitas dan pendapatan pelaku usaha. Dengan dana yang tersedia, pengusaha dapat berinvestasi dalam peralatan yang lebih baik, meningkatkan kualitas produk, atau memperluas jangkauan pasar. Ketika pendapatan usaha meningkat, pelaku usaha dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka dan keluarga, sehingga berkontribusi pada pengurangan tingkat kemiskinan dalam masyarakat.

Implementasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kabupaten Bireun menunjukkan peran penting dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dengan tujuan utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. KUR, sebagai program pemerintah, memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro untuk mendapatkan informasi melalui kegiatan penyuluhan yang diadakan oleh bank di desa-desa. Penyampaian informasi secara langsung dari perwakilan bank membantu pelaku usaha memahami karakteristik dan manfaat program ini, yang sangat penting mengingat banyaknya usaha mikro yang mengalami kesulitan dalam akses kredit. Proses pengajuan KUR dianggap cukup sederhana dan akomodatif, di mana pelaku usaha hanya perlu melengkapi dokumen dasar seperti KTP dan NPWP tanpa perlu menyusun proposal bisnis yang rumit. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa kemudahan

prosedur pengajuan menjadi faktor kunci dalam meningkatkan partisipasi pelaku UMKM dalam program-program pembiayaan pemerintah.

Tingkat margin KUR yang ditetapkan sebesar 6% per tahun menjadi daya tarik tersendiri bagi pelaku usaha, terutama jika dibandingkan dengan opsi kredit lain yang dapat mencapai 20% atau lebih. Meskipun ada informasi bahwa bunga KUR sedikit lebih tinggi dari yang diharapkan, banyak pelaku usaha tetap merasa bahwa beban bunga ini dapat ditanggung, mengingat manfaat yang mereka peroleh. Selain itu, persyaratan agunan yang relatif ringan, seperti sertifikat tanah atau BPKB kendaraan, semakin memudahkan akses pendanaan. Keberadaan staf bank yang kooperatif dan informatif juga berkontribusi dalam mempercepat dan mempermudah proses pengajuan KUR.

Dalam hal pengelolaan kewajiban pembayaran, para pelaku usaha menunjukkan disiplin yang baik. Mereka menjalin komunikasi yang efektif dengan pihak bank untuk mengatasi kendala yang mungkin muncul dalam pembayaran angsuran. Keterbukaan ini penting karena memungkinkan adanya restrukturisasi utang jika diperlukan, yang telah dibuktikan oleh penelitian sebelumnya. Selain itu, bank tidak hanya berperan sebagai pemberi pinjaman, tetapi juga menawarkan program pendampingan usaha dan pelatihan manajemen yang membantu meningkatkan kemampuan manajerial para debitur. Pendekatan komprehensif ini menunjukkan bahwa bank berkomitmen untuk

memberdayakan usaha kecil dan menengah, bukan hanya fokus pada pencapaian target penyaluran kredit.

KUR juga berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja. Ketika usaha mikro dan kecil berkembang, mereka cenderung merekrut lebih banyak tenaga kerja, yang pada gilirannya meningkatkan kesempatan kerja di komunitas sekitar. Peningkatan lapangan kerja ini membantu menurunkan angka pengangguran dan memberikan sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat. Disisi lain, KUR sering kali disertai dengan program pendampingan dan pelatihan manajemen yang ditawarkan oleh bank. Ini membantu pelaku usaha tidak hanya dalam pengelolaan keuangan, tetapi juga dalam pengembangan keterampilan bisnis yang lebih baik. Dengan pengetahuan yang lebih baik, pelaku usaha dapat mengelola bisnis mereka dengan lebih efisien, meningkatkan daya saing, dan memaksimalkan potensi pendapatan.

Keberadaan KUR meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan formal. Ketika pelaku usaha mikro merasakan manfaat dari program ini, mereka lebih cenderung untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi formal, yang dapat berkontribusi pada stabilitas ekonomi dan pengurangan kemiskinan jangka panjang. Dengan demikian, KUR tidak hanya berfungsi sebagai alat pembiayaan, tetapi juga sebagai katalisator untuk perubahan sosial dan ekonomi yang lebih luas, membantu mengentaskan kemiskinan di tingkat komunitas.

Lebih lanjut Kredit Usaha Rakyat (KUR) memiliki dampak signifikan terhadap pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan. Salah satu dampak utama KUR adalah memberikan akses pembiayaan yang lebih baik bagi UMKM, yang sering kali kesulitan mendapatkan modal dari sumber lain seperti bank komersial. Dengan suku bunga yang rendah dan persyaratan yang fleksibel, pelaku usaha dapat mengajukan pinjaman tanpa menghadapi hambatan birokrasi yang rumit. Akses modal ini memungkinkan pelaku usaha untuk memulai atau mengembangkan bisnis mereka, yang merupakan langkah penting dalam pertumbuhan usaha. Dengan dana yang diperoleh dari KUR, pelaku usaha dapat berinvestasi dalam peralatan dan bahan baku yang lebih baik, sehingga meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi operasional. Peningkatan produksi memungkinkan UMKM untuk memenuhi permintaan pasar yang lebih besar, sehingga meningkatkan pendapatan mereka dan memberikan stabilitas finansial. Selain itu, KUR juga mendorong diversifikasi produk dan layanan, memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk mengembangkan produk baru atau memperbaiki kualitas produk yang ada, yang pada gilirannya meningkatkan daya saing mereka di pasar.

Ketika UMKM berkembang, mereka cenderung merekrut lebih banyak tenaga kerja, menciptakan lapangan kerja baru yang membantu mengurangi tingkat pengangguran. Penciptaan lapangan

kerja ini memberikan sumber pendapatan bagi masyarakat, sehingga berkontribusi pada pengurangan kemiskinan. KUR sering kali dilengkapi dengan program pendampingan dan pelatihan, yang membantu pelaku usaha meningkatkan keterampilan manajerial dan teknis mereka. Dengan pengetahuan yang lebih baik tentang pengelolaan usaha dan keuangan, pelaku usaha dapat mengelola bisnis mereka dengan lebih efisien, memaksimalkan potensi pendapatan, dan meningkatkan daya saing. Keberhasilan KUR dalam membantu UMKM juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan formal. Ketika pelaku usaha merasakan manfaat dari program ini, mereka lebih cenderung untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi formal, yang memperkuat stabilitas ekonomi lokal. Dengan meningkatnya pendapatan dan keberlanjutan usaha, KUR berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pelaku usaha yang sukses dapat memberikan pendidikan yang lebih baik untuk anak-anak mereka, meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan, dan berkontribusi pada pembangunan komunitas yang lebih baik. Dengan demikian, KUR tidak hanya berfungsi sebagai alat pembiayaan, tetapi juga sebagai pendorong yang menciptakan dampak luas dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Adha, (2023) yang menemukan adanya dampak positif dan signifikan dari program KUR terhadap pengeluaran rumah tangga penerima KUR di Indonesia. Dampak program KUR terhadap

pengeluaran bukan makanan lebih besar yaitu sekitar 18,3%-28,1% dibandingkan dampaknya terhadap pengeluaran makanan sebesar 9,5%-14,2%. Hal ini menunjukkan tingkat kesejahteraan yang lebih baik dimiliki oleh rumah tangga yang berpartisipasi dalam program KUR. Namun, analisis statistik menunjukkan bahwa program ini sendiri belum sepenuhnya berpihak pada rumah tangga miskin, terlihat dari partisipasi program didominasi oleh rumah tangga kelas menengah dan tinggi. Untuk itu, pemerintah perlu memperluas jangkauan program bagi rumah tangga miskin dan bagi jenis usaha produktif seperti pertanian dan masyarakat di pedesaan. Selanjutnya penelitian Ulfa & Mulyadi, (2020) juga menemukan bahwa KUR memiliki dampak positif terhadap pengembangan usaha mikro di Kota Makassar dan pengembangan usaha mikro memiliki dampak positif terhadap penanggulangan kemiskinan.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian saya yang telah teliti dan uraikan pada bab sebelumnya. Maka dapat disimpulkan, yaitu :

1. Dari Hasil Penelitian yang saya dapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah memberikan dampak positif bagi pengembangan usaha mikro di Kabupaten Bireuen. KUR telah membantu meningkatkan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah ini. Dengan adanya KUR, para pengusaha UMKM dapat mengembangkan usahanya secara lebih optimal. Hal ini berdampak pada peningkatan produksi, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Meskipun demikian, upaya untuk meningkatkan efektivitas dan aksesibilitas KUR perlu dilakukan secara berkelanjutan. Pemerintah daerah dan lembaga keuangan terkait harus terus melakukan perbaikan pada sistem penyaluran, prosedur pengajuan, dan pengawasan pemanfaatan KUR.
2. Dari hasil yang telah saya amati dari penelitian saya dapat disimpulkan Implementasi KUR di Kabupaten Bireun menunjukkan bahwa program ini telah memberikan kemudahan dan manfaat bagi para pelaku usaha kecil dalam mengakses pembiayaan untuk mengembangkan usaha mereka. Kemudahan informasi, proses pengajuan yang

sederhana, tingkat bunga dan persyaratan yang terjangkau, serta dukungan dari bank menjadi faktor penting dalam keberhasilan program KUR. Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Bank Aceh Syariah yang dimulai pada tahun 2022 berkontribusi pada penurunan persentase kemiskinan di Kabupaten Bireun. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa persentase kemiskinan menurun dari 13,25% pada tahun 2021 menjadi 12,51% pada tahun 2022, dan terus berlanjut hingga mencapai 12,10% pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan dampak positif dari KUR, yang memberikan akses permodalan kepada pelaku UMKM, memungkinkan mereka untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan. Namun, penurunan kemiskinan ini tidak dapat sepenuhnya diatributkan kepada KUR saja.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, menurut saya ada beberapa beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas dan aksesibilitas Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kabupaten Bireuen antara lain:

1. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terkait informasi program KUR, prosedur pengajuan, dan persyaratan yang harus dipenuhi. Hal ini bertujuan agar KUR dapat dimanfaatkan secara lebih luas oleh UMKM di daerah tersebut.

2. Melakukan perbaikan pada sistem penyaluran dan prosedur pengajuan KUR agar lebih sederhana dan user-friendly. Proses yang cepat dan mudah akan meningkatkan minat dan aksesibilitas UMKM dalam mengajukan KUR.
3. Memperkuat pengawasan dan pemantauan terhadap pemanfaatan KUR oleh penerima, sehingga dapat memastikan dana KUR digunakan sesuai dengan tujuan program dan memberikan manfaat optimal bagi pengembangan usaha.
4. Melakukan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan asosiasi UMKM untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan yang masih dihadapi dalam implementasi KUR di wilayah tersebut.
5. Memperluas cakupan penyaluran KUR, tidak hanya bagi UMKM yang telah mapan, tetapi juga bagi pelaku usaha pemula dan usaha informal, agar manfaat KUR dapat dirasakan oleh lebih banyak masyarakat.
6. Mengkaji kemungkinan untuk menyediakan pendampingan dan pelatihan bagi penerima KUR, terutama dalam bidang manajemen usaha, pemasaran, dan pengembangan produk, agar UMKM dapat memanfaatkan KUR secara optimal untuk mengembangkan usahanya

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, R. B. (2023a). Dampak Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap Kesejahteraan Penerima KUR di Indonesia. *Bappenas*, VI(2), 240–253.
- Adha, R. B. (2023b). Dampak Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap Kesejahteraan Penerima KUR di Indonesia. *Bappenas Working Papers*, 6(2), 240–253.
- Arsane, W., & Darmawan, N. A. S. (2021). Prosedur Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero). *Widya Akuntansidan Keuangan*, 2(1), 11–22.
- Azzahra, D. D. G., Aini, W. R., & Desmawan, D. (2022). Analisis Dampak Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap kemiskinan Menurut Kabupaten dan Kota Di Provinsi Banten. *Profif: Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(4), 1–9.
- Bappenas. (2018). *Analisis Wilayah Dengan Kemiskinan Tinggi*. Kedeputian Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas.
- Bappenas. (2022). *Tingkat Kemiskinan*. Kementerian PPN/Bappenas.
- BPS. (2022). *Profil Kemiskinan di Indonesia*. Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2023a). *Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bireun*. <https://bireuenkab.bps.go.id/indicator/23/117/1/persentase-penduduk-miskin-p0-.html>
- BPS. (2023b). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023*. Badan Pusat Statistik.
- Budiarto, R. (2020). Efektivitas Implementasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Oleh Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Makassar Tamalanrea. *Prodi Administrasi*

Publik Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar.

- Farisi, S. Al, Fasa, M. I., & Suharto. (2022). Peran UMKM Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(1), 73.
- Gitiyarko, V. (2020). *Kebijakan Perlindungan dan Pemulihan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19*.
- Gunawan, I. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Bumi Aksara.
- Gunawan, R. (2023). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Produk Kur Mikro Terhadap Kepuasan Nasabah di BSI Outlet Kepahiang. *Prodi Studi Perbankan Syariah Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Curup*.
- Hartono, J. (2018). *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*. Andi.
- Hasballah, I. (2021). Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan Provinsi Aceh di Kabupaten/Kota. *Jurnal Al-Fkriah*, 10(1), 38–48.
- Hatuti, D. (2021). *Peluang dan Tantangan Bangkitnya UMKM Indonesia di Tengah Pandemi*. <https://uns.ac.id/id/uns-update/peluang-dan-tantangan-bangkitnya-umkm-indonesia-di-tengah-pandemi.html>
- Hilmi, Nasir, M., Ramlawati, & Peuru, C. D. (2022). Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Tolitoli. *GROWTH Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 20–27.
- Iztiyar, I., & Ashar, K. (2018). Analisis Pengaruh Kredit Usaha Rakyat Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Pengembangan Usaha Kecil dan Perekonomian di Indonesia. *Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang*.

- Jaya, I. M. L. M. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif: Teori, Penerapan, Dan Riset Nyata Anak Hebat Indonesia*. Anak Hebat Indonesia.
- Kasriyati. (2018). *Pengentasan Kemiskinan yang Belum Maksimal di Indonesia*. Salemba Empat.
- KemenkopUKM. (2023). *Perkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Pemerintah Percepat Penyaluran Kredit Usaha Rakyat*. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.
- Komariah, A., & Satori, D. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, CV.
- Kusumaningrum, S., & Yuhan, R. J. (2019). Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Indonesia Berdasarkan Indeks Komposit Pertumbuhan Inklusif dan Faktor yang Memengaruhinya. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 10(1), 1–17. <https://doi.org/10.22212/jekp.v10i1.1150>
- Maesya, A. A. (2015). Implementasi Kebijakan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan menengah di Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak. *Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*.
- Maulana, A., Fasa, M. I., & Suharto. (2022). Pengaruh Tingkat Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Islam. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 15(01), 220–229.
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 145–151.
- Moleong. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. PT. Remaja Rosdakarya.

- Mongkito, A. W., Putra, T. W., Imran, M., Novita, K., & Ansar, A. N. (2021). Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro. *Robust-Research Business and Economics Studies*, 1(1), 91–104.
- Nuraffiati, B. I. (2023). Analisis Produk KUR dan Kualitas Pelayanan dalam Meningkatkan Minat Menjadi Nasabah (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Kc Sutisna Senjaya Kota Tasikmalaya. *Thesis, Universitas Siliwangi*.
- Okuputra, M. A., & Nasihk. (2022). Pengaruh Inovasi Daerah Terhadap Kemiskinan. *INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Manajemen*, 18(1), 159–166.
- Pasaribu, S. G., Wijaya, A., & Junaidi, A. (2020). Analisis Peran Kredit Usaha Rakyat terhadap Perkembangan UMKM di Kelurahan Temindung Permai. *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman*, 5(4), 1–10.
- Pujaastawa, I. B. G. (2016). *Teknik Wawancara dan Observasi Untuk Pengumpulan Badan Informasi*. Universitas Udayana.
- Pusporini. (2020). Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan Pada Pelaku UMKM Kecamatan CInere Depok. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(1), 58–69.
- Putra, H. P., Diaudin, M., Fahrudin, R., & Suwanan, A. F. (2021). Pengaruh Laju Pertumbuhan Penduduk, Gini Ratio dan Pertumbuhan PDRB Perkapita Terhadap Angka Kemiskinan di Kota Blitar Tahun 2011-2020. *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, 18(2), 152–161.
- Rahmadani, R. D. (2022). Analisis Strategi Pengembangan UMKM Kabupaten Sidoarjo di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran (JPAP)*, 10(2), 1–15.
- Rahmatullah, A. (2020). *Peluang Dan Tantangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Era Digital*. <https://iesp.ulm.ac.id/peluang-dan-tantangan-usaha-mikro->

kecil-dan-menengah-di-era-digital/

- Ratnasari, T. (2022). Peran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Petani Udang di Tinjau dari Perspektif Ekonomi Islam di Desa Labuhan Ratu Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur. *Fakultas EKonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*.
- Sekaran, U. dan R. B. (2019). *Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Keahlian*. Salemba Empat.
- Silalahi, D. E., & Ginting, R. R. (2020). Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia Untuk Mengatur Penerimaan dan Pengeluaran Negara Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 3(2), 156–167. <https://doi.org/10.36778/jesya.v3i2.193>
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Suryani. (2023). *Dukung UMKM, Bank Aceh Salurkan KUR Tahap 1 2023 Sebesar Rp510 Miliar*. <https://kabarbireuen.com/dukung-umkm-bank-aceh-salurkan-kur-tahap-1-2023-sebesar-rp510-miliar/>
- Ulfa, M., & Mulyadi, dan M. (2020a). Analisis Dampak Kredit Usaha Rakyat pada Sektor Usaha Mikro terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kota Makassar. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 11(1), 17–28.
- Ulfa, M., & Mulyadi, M. (2020b). Analisis Dampak Kredit Usaha Rakyat pada Sektor Usaha Mikro terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kota Makassar. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 11(1), 1–10.
- Ummah, I. R., Azizi, A. A., & Yasin, M. (2023). Pengaruh Kemiskinan Terhadap Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Khususnya Inflasi dan Pengangguran di Kota Surabaya. *Jurnal Manajemen Kreatif Dan Inovasi*, 1(3), 21–34.

Vinatra, S. (2023). Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Kesejahteraan Perekonomian Negara dan Masyarakat. *Jurnal Akuntan Publik*, 1(3), 1–8.

WorldBank. (2019). *World Bank: World Development Indicators*. World Bank.



Pertanyaan / wawancara untuk pihak pengambil Kredit Usaha Rakyat :

1. Apa yang mendorong Anda untuk mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR)?
2. Bagaimana Anda menemukan informasi tentang KUR dan apa yang membuat Anda tertarik untuk mengajukannya?
3. Bisakah Anda menjelaskan proses pengajuan KUR yang Anda lalui? Apakah ada hal-hal yang menonjol atau mengejutkan dari proses tersebut?
4. Bagaimana Anda menggunakan dana KUR yang telah diterima? Apakah ada rencana khusus atau strategi yang Anda buat untuk memanfaatkannya secara efektif?
5. Apakah Anda merasa bahwa KUR membantu dalam pengembangan usaha Anda? Jika ya, bisa Anda jelaskan bagaimana?
6. Apakah ada tantangan atau hambatan yang Anda alami dalam memanfaatkan dana KUR?
7. Bagaimana Anda menilai margin dan persyaratan lainnya dari KUR yang Anda terima?
8. Bagaimana Anda menangani kewajiban pembayaran angsuran? Apakah ada strategi atau tips yang Anda terapkan untuk memastikan pembayaran tepat waktu?
9. Apakah Anda merasa program KUR telah memenuhi harapan Anda? Jika tidak, mengapa?
10. Apa saran atau masukan Anda untuk pemerintah atau lembaga keuangan terkait untuk meningkatkan efektivitas atau aksesibilitas KUR di masa depan?

Pertanyaan / wawancara untuk pihak yang Meminjamkan modal Kredit Usaha Rakyat :

1. Bagaimana lembaga keuangan ini mendefinisikan tujuan dan misi dalam memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR)?
2. Apa saja proses yang harus dilalui oleh calon peminjam untuk mengajukan KUR di lembaga keuangan ini?

3. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon peminjam untuk memenuhi kriteria penerimaan KUR?
4. Bagaimana lembaga keuangan ini menilai risiko kredit ketika margin KUR?
5. Bagaimana margin dan jangka waktu pembayaran ditentukan untuk KUR?
6. Apa peran lembaga keuangan dalam memberikan dukungan atau bantuan kepada peminjam selama masa pinjaman?
7. Bagaimana lembaga keuangan ini mengelola dan memantau kinerja portofolio KUR-nya?
8. Apa langkah-langkah yang diambil jika peminjam mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran KUR?
9. Bagaimana lembaga keuangan ini memastikan transparansi dan keadilan dalam proses pengajuan dan penilaian KUR?
10. Apa upaya atau inisiatif yang dilakukan oleh lembaga keuangan ini untuk meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas program KUR bagi masyarakat?



1. Dokumentasi dengan Bapak Kepala divisi Keuangan Bidang KUR Cabang Bank Aceh Kab Bireun



2. Dokumentasi dengan Pelaku Usaha yang mengambil KUR di Kab Bireun

